

## BAB II

### PENOLAKAN CHINA TERHADAP TEKANAN AMERIKA SERIKAT

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap, maka bab ini akan memberikan deskripsi mengenai reformasi sistem nilai tukar China. Disini akan dijelaskan mengenai perjalanan reformasi itu sendiri. Hal ini diperlukan karena reformasi sistem nilai tukar China telah berjalan sebelum 2003. Kemudian, akan dipaparkan mengenai tekanan AS dalam isu ini, apa dan bagaimana. Dengan demikian, diharapkan bahwa bagian ini dapat menunjukkan konteks dalam penolakan China ini.

#### II.1. Reformasi Sistem Nilai Tukar China

IMF memberikan pembedaan sistem nilai tukar secara *de facto* dan *de jure*. Yang menjadi dasar dalam penentuan sistem nilai tukar China adalah pembagian secara *de facto* tersebut. Berikut merupakan tabel pembagiannya:

**Tabel 2.1. Klasifikasi Rejim Sistem Nilai Tukar De-Facto**

<i>Exchange Rate Regime</i>	<i>Hard Regimes</i>	<i>Peg</i>	<i>No separate legal tender</i>	<i>Formal Dollarization</i>	
				<i>Currency Union</i>	
				<i>Currency board arrangements</i>	
	<i>Intermediate Regimes</i>	<i>Soft pegs</i>	<i>Conventional fixed pegs via-  =====</i>		
			<i>Crawling pegs</i>		
			<i>Pegged rates within a horizontal band</i>		
			<i>Pegged rates within crawling bands</i>		
	<i>Floating Regime</i>			<i>Tightly- or other managed floating with no predetermined path for the exchange rate</i>	
	<i>Floating Regime</i>			<i>Independently floating</i>	

(Sumber: gfc.nottingham.edu.cn, 2003)

Sistem nilai tukar China telah mengalami perkembangan sejak China melakukan reformasi ekonomi pada tahun 1979. dengan memberikan deskripsi evolusi sistem nilai tukar ini, akan ditemukan pola yang dipakai oleh pemerintah China.

### II.1.1. Era Pra Reformasi China 1979

Pada masa ini China menerapkan sistem *central planning*. Selama bertahun-tahun, sistem nilai tukar dibangun berdasarkan rejim perdagangan luar negerinya. Karakteristik utama sistem perdagangan luar negeri China saat itu adalah monopoli, *central planning*, dan *centralized accounting*. Monopoli perdagangan luar negeri dilakukan oleh perusahaan perdagangan luar negeri milik negara. Monopoli ini dilakukan dengan tujuan membantu menghadapi *shocks* eksternal dan menjamin bahwa pemerintah pusat dapat memaksimalkan program industrialisasi. Dengan sistem *central planning*, semua impor dan ekspor dikontrol oleh negara. Rencana perdagangan luar negeri akan ditetapkan berdasarkan *national economic plan* dan ketersediaan sumber-sumber ekspor negara. Ekspor dilakukan untuk menghasilkan valuta asing untuk mendukung impor, sedangkan impor diperlukan untuk mengisi kekuarangan dalam kapasitas produksi negara dan meningkatkan total *supplies* seperti yang dimandatkan dalam *national economic plan*. (Lin dan Schramm, 2003)

*Centralized accounting* mengacu pada sistem dimana semua pendapatan valuta asing dari eksportir domestik diberikan ke pemerintah dan demand terhadap valuta asing itu sendiri akan dialokasikan melalui *state planning*. Jika sector perdagangan luar negeri mengalami domestik *currency loss*, pemerintah akan secara otomatis menutupi kerugian tersebut melalui *central budget*. Di sisi lain, para eksportir dan importir domestik harus memberikan semua keuntungan dalam mata uang domestiknya kepada *central budget*. Karena mekanisme *automatic tax-subsidy* ini, nilai tukar dapat ditetapkan pada satu *arbitrary level*, tidak dipengaruhi oleh perubahan harga dan variabel ekonomi lainnya. (Lin dan Schramm, 2003)

Ketiga faktor institusional ini, dibuat untuk mendukung sistem ekonomi terencana. Pada periode ini, nilai tukar hanya berperan sebagai *accounting function* untuk menentukan nilai keuntungan atau subsidi. Nilai tukar *fixed* hanyalah satu elemen dalam konstelasi dari harga-harga yang tidak berdasarkan pasar. *Bank of China* merupakan satu-satunya bank dalam urusan valuta asing (Jingtao, 2008).

### II.1.2. Era Post 1979

Sejak reformasi ekonomi 1979, rejim nilai tukar China secara gradual mengalami transformasi dari yang direncanakan secara terpusat menjadi lebih *market-oriented*. Proses ini diiringi dengan liberalisasi neraca perdagangan, investasi secara langsung demi penguatan sektor real dan kapasitas ekspor. Pada sisi lain, reformasi sistem nilai tukar juga dibutuhkan dalam rangka menyeimbangi perkembangan sektor finansial. Reformasi yang diperhitungkan secara cermat sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran transformasi ekonomi China dalam proses integrasi pasar global (Lin dan Schramm, 2003).

Reformasi yang dilakukan terhadap sistem nilai tukarnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) *fase utama*. *Rejim nilai tukar China mengalami evolusi dari sistem nilai tukar dual-track menjadi fixed peg terhadap U.S. Dollar dan akhirnya managed float with reference to a basket currency pada tahun 2005.*

**Tabel 2.2 Sinopsis Reformasi Rejim Nilai Tukar China Post-1979**

<b>Tahun</b>	<b>Major Event atau Perkembangan</b>
1979	Dimulainya reformasi fundamental. Desentralisasi ekspor dan impor. Pendirian <i>State Administration of Foreign Exchange (SAFE)</i> . Memperkenalkan skema <i>foreign exchange retention</i> . Beberapa nilai tukar digunakan dalam perdagangan antara (12) <i>Foreign Trade Corporations (FTCs)</i> milik pemerintah dan perusahaan domestik, tergantung pada barang dagangannya.
1981	Didirikan sebuah <i>Internal Settlement Rate (ISR)</i> untuk transaksi perdagangan luar negeri.
1984	ISR dipersatukan dengan nilai tukar resmi
1985	ISR dihapuskan. Rasionalisasi <i>system of surrender requirement</i> dan <i>foreign exchange retention</i>
1986	Didirikan pusat pertukaran mata uang asing yaitu <i>Foreign Exchange Adjustment Centers (FEACs)</i> untuk transaksi perdagangan oleh <i>Foreign Funded Enterprises (FEEs)</i> dan diperkenalkannya sistem tukar dual. Nilai tukar yang ditentukan oleh pasar tukar ( <i>swap market</i> ) relatif lebih fleksibel daripada <i>rate</i>

	resmi. Perusahaan domestik diharuskan melakukan ekspor <i>receipts</i> pada nilai tukar resmi tapi menerima <i>retention quota</i> sebagai bagian dari pendapatan ekspor.
1988	Pembayaran ekstra ke <i>swap center</i> diperluas kepada seluruh perusahaan domestik dengan penghasilan dari luar negeri atau <i>retention quotas</i> .
1994	Nilai tukar resmi disatukan dengan nilai tukar pada pasar. <i>Retention system</i> dihapuskan. <i>China's Foreign Exchange Trading System</i> (CFETs) sebagai <i>interbank market</i> , -pasar antar bank-, didirikan di Shanghai untuk transaksi perdagangan perusahaan domestik. Transaksis perdagangan oleh FEEs dilakukan di <i>swap center</i> . Nilai tukar resmi ditentukan oleh <i>interbank market</i> . Dimulainya perdagangan dalam U.S. Dollar dan HK Dollar.
1995	Dimulainya perdagangan <i>interbank</i> dalam Yen Jepang.
1996	China memulai <i>current accoun convertibility</i> . FEEs diijinkan memasuki <i>interbank market</i> . Dihapuskannya larangan pertukaran mata uang asing oleh penduduk domestik.
1998	<i>Swap centers</i> ditutup.
2001	China memasuki WTO
2002	Dimulainya perdagangan dalam Euro dalam <i>interbank market</i>
2005	Apresiasi RMB senilai 2,1 % terhadap US Dollar. Rejim nilai tukar China menjadi a amnagaed float with reference to a basket currencies (US Dollar, Euro, Yen Jepang, Won Korea), tergantung pada permintaan dan penawaran.

(Sumber: China Economic Review, 2003)

### II.1.2.1. Tahun 1979 – 1993 : Sistem *Dual-Track*

Desentralisasi pengaturan perdagangan luar negeri menjadi awal pendirian banyak perusahaan-perusahaan swasta di China. Pada akhir 1981, terdapat lebih kurang 400 korporasi perdagangan luar negeri yang baru. Pada pertengahan tahun

1990an, jumlahnya telah melampaui 10.000 (Lin dan Schramm, 2003). Paska reformasi 1979, nilai tukar resmi RMB didevaluasi berulang kali cukup lama. Pada grafik di atas ditunjukkan bahwa sejak reformasi dilakukan, nilai tukar RMB terhadap Dollar terus meningkat dan stabil pada satu level sejak 1994. Sistem *dual-track* terdiri dari satu nilai tukar resmi dan satu ISR transaksi yang terkait dengan perdagangan luar negeri. Sistem *dual-track* ini mulai ditinggalkan pada tahun 1994 ketika pemerintah China menyatukan nilai tukar resmi dengan *swap rate*.

Pada tahap pertama reformasi ini yaitu 1979-1984, sistem *dual-track* secara gradual dikembangkan sampai ISR dihapuskan pada 1 Januari 1985. Pada Maret 1979, SAFE didirikan untuk mengambil alih kontrol terhadap penukaran mata uang asing. Sebuah sistem *foreign exchange retention* akhirnya diperkenalkan untuk meningkatkan insentif eksportir setelah pemerintah memperbaharui penanganan pemasukan dari valuta asing. Sebelumnya, para eksportir diharuskan memberikan semua pemasukan valuta asing kepada pemerintah. Di bawah skema *retention* yang baru, eksportir diharuskan untuk memberikan pendapat valuta asing mereka yang sebenarnya untuk ditukar dengan *retention quota* yang dikeluarkan oleh SAFE yang seimbang dengan sebuah bagian dalam pendapatan itu. *Retention quota* ini, yang memberikan izin kepada pemiliknya untuk membeli valuta asing pada nilai tukar resmi, dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa luar negeri yang diizinkan oleh negara. Sejak Oktober 1980, *quota* ini diperdagangkan antara *Foreign Trade Corporations* (FTCs) dan perusahaan domestik yang diberi izin untuk membelinya di beberapa kota besar termasuk Beijing, Shanghai, dan Guangzhou (Jingtao, 2008).

Penggunaan sistem nilai tukar dual ini merupakan sebuah kompromi terhadap debat mengenai level nilai tukar RMB yang tepat. Debat ini terjadi diantara pada politisi dan ekonom China. Satu kelompok meyakini bahwa nilai tukar yang dipakai mengalami *undervaluation* sehingga dibutuhkan revaluasi. Kesimpulan ini diambil berdasarkan harga barang dan jasa yang primer di China jauh lebih rendah dari negara-negara yang maju. Kelompok lain yang terdiri dari akademisi dan *official* menyatakan bahwa nilai tukar mengalami *overvaluation*. Argumennya adalah karena pada nilai tukar resmi, banyak eksportir yang tidak

berhasil menutupi biaya ekspornya. Pada tahun 1978, 66% dari total ekspor China tidak mendapatkan keuntungan (Lin dan Schramm, 2003).

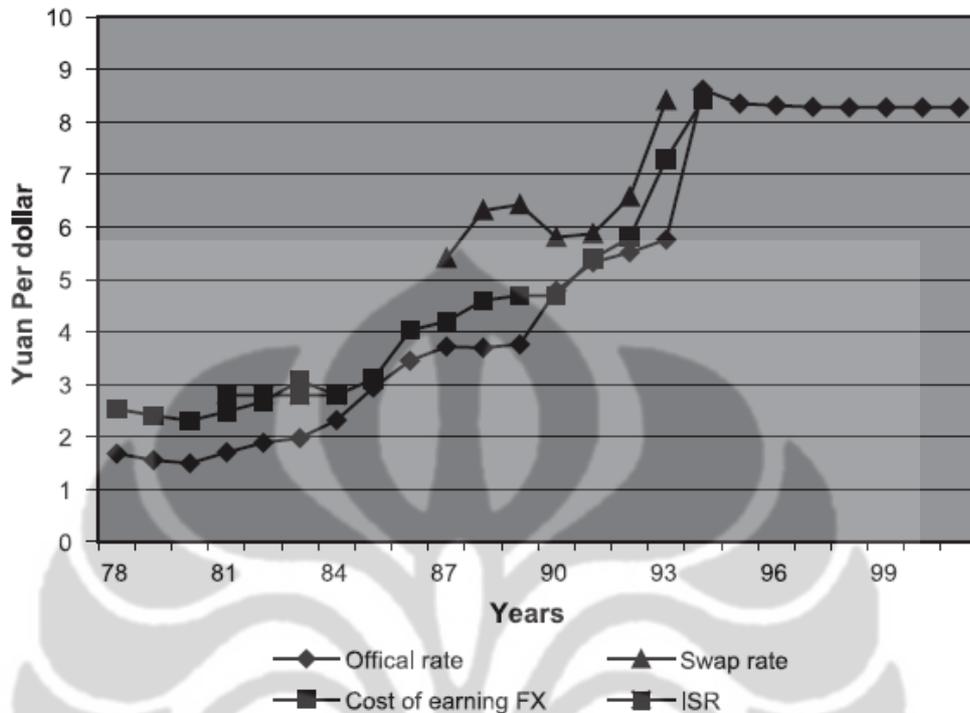
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memutuskan untuk melakukan revaluasi terhadap RMB ISR pada tanggal 1 Januari 1981. Dengan pengaturan ini, *retention quota* dapat diperdagangkan antara FTCs (pemegang) dan perusahaan domestik pada harga ISR 2,8 Yuan per Dollar dalam *range* lebih kurang 10%. ISR digunakan pada transaksi nilai tukar asing yang terkait dengan perdagangan sedangkan nilai tukar resmi digunakan sebagian besar untuk transaksi yang terkait dengan jasa seperti *remittance* luar negeri China, pariwisata, dan lainnya. Nilai tukar resmi disesuaikan dengan perubahan nilai dari *basket of currencies*. Selama tiga tahun berikutnya, nilai tukar resmi mengalami devaluasi secara progresif dan disatukan dengan ISR pada tahun 1984.

Sistem nilai tukar *dual-track* ini menyebabkan beberapa distorsi. Tahun 1985, *remittances* dari luar negeri mengalami penurunan drastis karena orang China yang berada di luar membawa barang-barang ke dalam negeri menggantikan mata uang dan kemudian terlibat dalam pasar gelap. Pemerintah AS menuduh China memberikan subsidi untuk mendukung sektor ekspor karena ISR yang terus mengalami *overvalued*. Karenanya, sistem *dual-track* ini secara resmi ditinggalkan pada 1 Januari 1985.

Ketika suatu negara mempertahankan beberapa nilai tukar, klasifikasi *de facto* dilakukan berdasarkan nilai tukar yang dipakai di sebagian besar transaksi. Pada tahun 1979-1984, secara *de facto*, China menerapkan sistem nilai tukar *peg within horizontal band*. Karena RMB ISR memainkan peran besar dalam transaksi yang terkait perdagangan dan dibiarkan mengalami fluktuasi dalam margin 1% sekitar nilai *de facto* 2,8 Yuan per Dollar (Jingtao, 2008).

Pada tahap ke dua, 1985-1993, sistem nilai tukar *dual-track* kembali muncul dengan pendirian *foreign exchange adjustment centers* atau *swap centre* dimana perusahaan-perusahaan yang disetujui dapat membeli dan menjual *retention quota*, dan dimana nilai tukar resmi *coexisted* dengan *rate* yang ditentukan pasar. Nilai tukar resmi secara periodik disesuaikan nilainya sesuai dengan perubahan nilai *basket currencies*, sementara *swap rate* ditentukan oleh pasar, mengalami depresiasi (Jingtao, 2008). Reformasi tahap kedua ini berfokus

pada pencapaian independensi di perusahaan-perusahaan terkait perdagangan luar negeri dari kontrol pemerintah. Akan tetapi hal ini tidak tercapai karena kondisi perekonomian yang tidak baik pada awal tahun 1984.



**Gambar 2.1. Nilai Tukar China 1978-2001**

(Sumber: China Economic Review, 2003)

Pada awal 1993, pemerintah mencoba untuk menutup *swap market* namun akhirnya usaha tersebut dibatalkan karena transaksi akhirnya beralih ke pasar gelap. Transaksi pada *swap market* pun terus mengalami peningkatan. Sebelum 1991, *swap rate* dipakai pada hamper 50% dari transaksi pertukaran mata uang asing, tapi meningkat sampai 80% sesudah 1991. Jumlah *swap center* pun terus bertambah seiring dengan desentralisasi sector perdagangan. Tahun 1993, terdapat 108 *swap center* di China. Nilai tukar resmi mengalami devaluasi dan disatukan dengan *swap rate* pada tahun 1994 dan secara resmi (Jingtao, 2008 ).

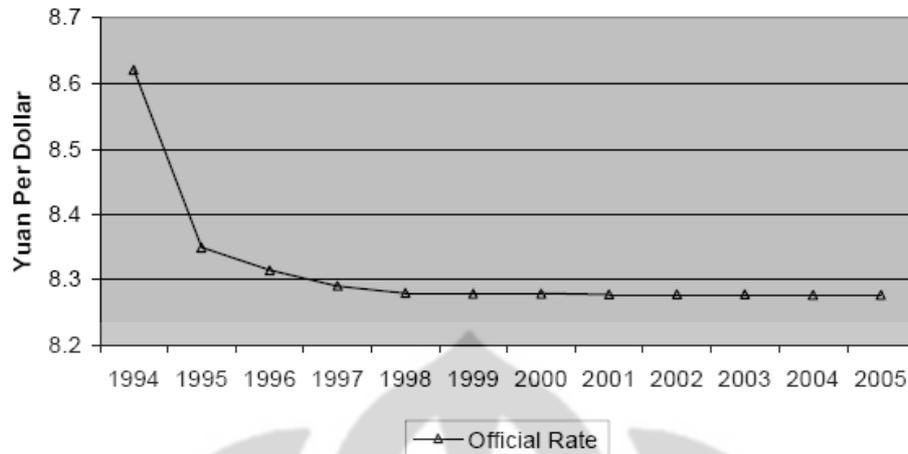
Berdasarkan prinsip penentuan rejim secara *de facto*, dalam kasus *multiple exchange rates*, dapat dikatakan China menganut rejim *managed float* pada periode 1985-1993. Masa ini juga ditandai dengan tidak adanya arah penentuan nilai tukar sebelumnya. Pada masa ini, *swap rate* memainkan peran

yang besar dalam transaksi mata uang asing dan nilainya semakin lama semakin market-based. Pemerintah ingin mempengaruhi pergerakan nilai tukar melalui intervensi yang aktif tanpa menentukan terlebih dahulu arah nilai tukar dalam proses reformasi.

#### **II.1.2.2. Tahun 1994 – 2005 : Sistem Nilai Tukar Peg**

Pada November 1993 (Jingtao, 2008), China mengadopsi sistem yang ditujukan untuk mencapai ekonomi pasar sosialis. Pembaharuan yang paling komprehensif terhadap sistem nilai tukar dilakukan untuk membangun *a market-based managed floating exchange system*, mendirikan satu pasar tukar valuta asing yang seragam, dan akhirnya untuk mencapai RMB yang *convertible*. Pada akhir tahun 1993, nilai tukar resmi dan *swap rate* disatukan pada harga 8,7 Yuan per Dollar. Sistem yang dapat disebut dengan *official unified managed floating exchange rate regime* ini beroperasi sampai akhir Juli 2005.

Setelah terjadi penyatuan nilai tukar dual, skema *retention* dihapuskan. Pada 4 April 1984, *China's Foreign Exchange Trading System (CFETS)* didirikan di Shanghai sebagai *interbank* untuk transaksi valuta asing perusahaan domestik. Ini adalah dalam rangka menggantikan *swap centers* yang lama yang di transformasi menjadi cabang-cabang CFETS dan dihubungkan dengan pusat Shanghai melalui jaringan elektronik nasional. Foreign Funded Enterprises (FEEs) diijinkan untuk tetap beroperasi di *swap market* untuk memenuhi permintaan valuta asing mereka tanpa harus melalui sistem perbankan. Transaksi di *swap centers* dilakukan pada *rate* pasar *interbank* yang disetujui oleh SAFE. Pada Maret 1996, SAFE mulai menjamin akses FEEs ke dalam *interbank market*, mengijinkan mereka untuk melakukan jual-beli valuta asing melalui bank-bank yang ditetapkan yang ada di Jiangsu, Shanghai, dan Dalian. Bank-bank yang didanai pihak asing juga diizinkan untuk menyediakan jasa bagi FEEs tapi tidak kepada perusahaan domestik. Melalui penyesuaian-penyesuaian ini, sebuah sistem baru untuk perdagangan valuta asing diperluas ke seluruh negara pada tanggal 1 Juli 1996. Dan pada Desember 1996, China menerima *obligations* dibawah artikel VIII dalam IMF *Articles of Agreement* dan akhirnya mencapai *current account convertibility*. (Jingtao, 2008).



Source: *International Financial Statistics (IFS) Yearbook 2006*, IMF Publications.

### Gambar 2.2 Grafik Dinamika Nilai Tukar Resmi RMB 1994-2005

(Sumber: China Economic Review, 2003)

Di bawah sistem yang baru ini, nilai tukar RMB diijinkan untuk mengambang dalam batasan lebih kurang 0,3 % dari *rate* yang dikeluarkan oleh PBC untuk transaksi *interbank*, maksimum 0,15 % untuk transaksi *retail*. Monopoli bilateral menjadi karakteristik utama struktur *interbank market* saat itu. BOC mengontrol transaksi valuta asing retail dan sekitar 70% dari total transaksi *interbank*, sementara PBC adalah pembeli terbesar dari valuta asing, sekitar 60-70% dari total volume pembelian. Dibawah struktur ini, paritas RMB terhadap USDollar dipertahankan pada level konstan. Walaupun *interbank market* diharapkan menyediakan mekanisme pembentukan harga untuk nilai tukar RMB, secara operasional RMB beroperasi dibawah sistem *peg*. (Jingtao, 2008)

Bertentangan dengan harapan untuk percepatan reformasi menuju liberalisasi neraca pembayaran, krisis keuangan yang melanda Asia pada tahun 1997 mendorong China untuk mempertahankan kontrol terhadap modal. Terkait dengan *uncertainties* nilai RMB dan arus keluar modal tidak resmi dikarenakan prospek ekonomi yang lemah. Karena itu keluarnya modal secara ilegal menjadi perhatian utama SAFE saat itu. Pada Desember 1998, PBC secara permanen menutup *swap centers* untuk FEEs karena kemungkinan akan digunakan sebagai

‘vehicles’ untuk keluarnya modal. Pasar valuta asing disatukan dan semua transaksi untuk perusahaan domestik dan juga FEEs dilakukan di *interbank market*.(Jingtao, 2008).

Ketika negara-negara tetangga Asia melakukan devaluasi mata uang, pemerintah China berkomitmen untuk mempertahankan stabilitas nilai RMB. *Reserves* valuta asing yang mencukupi, batasan keras bagi modal keluar membantu pemerintah dalam mempertahankan nilai RMB. Nilai tukar RMB terapresiasi pada level yang rendah dimana pada Agustus 1997 pada level 8,28 Yuan per Dollar, menjadi 8,27 Yuan per Dollar pada akhir 1997 dan tetap pada level itu sampai pada Juli 2005.(Lin dan Schramm, 2003).

Secara *de facto*, rejim nilai tukar China pada periode 1994-2005 dapat diklasifikasikan menjadi sistem *peg* konvensional, dimana mengikat RMB ke Dollar. Walaupun pada masa itu, pemerintah China mengklaim memakai sistem *managed float*. Pada tahun 1994, nilai tukar RMB diijikan mengambang pada batas 0,3% pada *rate* yang ditetapkan PBC untuk transaksi *interbank*. Antara tahun 1995 sampai 2005, RMB diperbolehkan mengambang pada batas 1% dari *fixed rate* yaitu 8,28 Yuan per Dollar.(Jingtao, 2008).

### **II.1.2.3. Post 2005 : Sistem Managed Float**

Sistem nilai tukar *de facto peg* yang dipakai oleh China memberikan pengaruh yang positif bagi perekonomian China. Ketika akhirnya China melakukan revaluasi mata uang (the People’s Bank of China, 2005) tujuannya adalah untuk mendirikan dan meningkatkan sistem ekonomi pasar sosialis di China, memampukan pasar untuk memainkan perannya secara utuh dalam alokasi sumber daya dan juga untuk mencapai dan memperkuat rejim nilai tukar *managed floating* berdasarkan hukum *supply* dan *demand*. Di bawah rejim yang baru ini, nilai tukar Yuan disesuaikan menjadi 8,11 Yuan per Dollar, terhitung mengalami apresiasi 2,1%. Namun perlu ditegaskan bahwa dibawah sistem ini, pergerakan mata uang China juga masih terbatas. Intervensi pemerintah masih tetap diberlakukan.

## **II.2. Tekanan Amerika Serikat**

Tekanan domestik AS dalam isu ini, sebagian besar datang dari *House of Representative* AS. Berbagai legislasi dalam bentuk *resolution* ataupun *bill* mulai dikeluarkan pada tahun 2003 yang pada umumnya berupa larangan atau hambatan terhadap impor dari China. Keterlibatan para politisi Washington membawa dimensi politik yang sangat jelas dalam isu ini. Dengan menghubungkan *undervalued* Yuan dan melemahnya industri AS serta penurunan lapangan pekerjaan di AS, isu ini mendapat perhatian yang besar dari publik. Media AS juga memberikan gambaran yang, oleh sebagian pihak, dianggap berlebihan dalam melihat pengaruh China (mata uangnya) terhadap masalah ekonomi domestik AS (*Focus*, 2003). Apresiasi RMB terhadap Dollar sebesar 40% (Bergsten, 2007) akan menjadi harapan pemerintah untuk dapat mengurangi deficit AS sekita US\$150 milyar.

Legislasi yang dikeluarkan oleh Kongres AS ini berupa *trade bills* ini bila disahkan sebagai hukum maka akan menimbulkan kenaikan pajak terhadap produk impor dari China. Beberapa diantaranya yang dikeluarkan adalah HR.3058, HR.3364, HR.4177, HR.4986, S.1586, S.1592 and S.1758 (*Congress*, 2005). Selain itu dikeluarkan pula *bill* untuk merevokasi *the Continued Dumping and Subsidy Offset Act*, yang disebut dengan "Byrd amendment" (HR.3933 dan S.1299), merevisi *the US anti-dumping law* (HR.2365, S.136 dan S 219), mengembalikan "Super 301" (HR.4120 dan S.2372), mengizinkan pemberlakuan pajak tandingan terhadap impor dari *non-market economies* (HR.3716 and S .2212), dan mereformasi *the Ekspor Administration Act* yang telah habis masa berlakunya (HR 55). Selain dalam bentuk legislasi, tekanan AS juga datang secara langsung melalui diplomasi di berbagai pertemuan-pertemuan internasional, baik bilateral maupun multilateral. Akhirnya isu ini menjadi perhatian bukan hanya kelompok-kelompok kepentingan politik, tetapi juga tokoh-tokoh publik, kelompok proteksionis, organisasi-organisasi non-pemerintah (*Focus*, 2003).

Berikut merupakan perkembangan berbagai bentuk tekanan AS pada periode 2003-2005 (*China's*, 2005):

**Tabel 2.3. Perkembangan Tekanan AS dalam Isu Revaluasi Yuan**

Tanggal	Aktor	Perkembangan Bentuk Tekanan AS	Keterangan
29 Agustus 2003	Organisasi perdagangan AS	Ancaman hambatan perdagangan	80 organisasi perdagangan di AS meminta pemberlakuan <b>section 301</b> <sup>1</sup> untuk menentukan apakah nilai tukar Yuan membawa ke praktek perdagangan yang tidak adil.
1 September 2003	Presiden George W. Bush	Diplomasi	Pernyataan langsung Presiden Bush melalui pidatonya di Hari Buruh, menyatakan keinginannya untuk menekan <i>convertibility</i> dari beberapa mata uang.
2 September 2003	<i>Treasury Department</i> AS (sekretaris : John Snow)	Diplomasi	<i>Treasury Secretary</i> AS, John Snow menyatakan dengan jelas posisi AS ketika berpidato di IMF dengan menyatakan bahwa <i>a free-floating yuan</i> adalah baik untuk Bank Sentral China dan akan membantu China untuk menangani berbagai tekanan dari dalam maupun luar.
3 September 2003	<i>Treasury Department</i> AS (sekretaris : John Snow)	Diplomasi	Ketika mengadakan kunjungan ke China untuk mendiskusikan hubungan ekonomi AS-China, Snow menyatakan bahwa revaluasi dan reformasi ke sistem <i>market-based</i> adalah hal yang diperlukan China, AS dan ekonomi dunia. Melalui <i>Press Roundtable</i> , Snow menegaskan bahwa semakin AS mendesak China untuk melakukan reformasi, maka semakin cepat pula China akan melakukannya. ( <i>Press</i> , 2003)
3 September 2003	UNITE	Hambatan perdagangan	UNITE, sebuah persatuan yang mewakili 250,000 pekerja konveksi, laundry, dan penyalur mengumumkan

<sup>1</sup> [Section 301 of the Trade Act of 1974](#) memberikan otoritas kepada AS untuk memperkuat perjanjian perdagangan, menyelesaikan trade disputes, membuka pasar asing bagi produk AS. Ini merupakan *principal statutory authority* dimana dibawahnya AS dapat memberikan sanksi perdagangan kepada negara yang melanggar perjanjian perdagangan atau terlibat dengan praktek perdagangan tidak adil. Ketika negosiasi mengenai praktek perdagangan tersebut gagal, maka AS dapat mengambil tindakan dengan menaikkan pajak impor terhadap produk dari negara tersebut untuk menyeimbangkan kembali konsesi yang hilang.

			kampanye untuk menekan arus impor dari China.
5 September 2003	Senat AS	Resolusi (ancaman hambatan perdagangan)	Senat AS mengeluarkan resolusi S.1586 untuk meminta negosiasi mata uang dengan China dalam 180 hari dengan ancaman sanksi. Sanksi yang dimaksud adalah pemberian tariff 27.5 % terhadap seluruh impor dari China (Hufbauer dan Brunel, 2007).
5 September 2003	<i>Treasury Department AS</i> (sekretaris : John Snow)	Diplomasi	Snow menegaskan pentingnya sistem nilai tukar bagi ekonomi dunia, khususnya Asia Pasifik sebagai wilayah berkembang. Hal ini disampaikannya pada <i>Meeting of the Asia-Pacific Economic Cooperation Forum Finance Ministers</i> di Phuket, Thailand ( <i>Statemet</i> , 2003)
10 September 2008	Senat AS	Resolusi	Senat mengajukan HR.3058 untuk meneliti atau melakukan pengecekan dengan istilah "China's currency manipulation". Sekretaris Treasury AS diminta untuk menangani situasi ini dan memberlakukan tariff tambahan bila diperlukan.
11 September 2003	Senat AS	<i>Hearing</i>	Senat melakukan <i>hearing</i> mengenai hubungan AS-China. <i>Hearing</i> ini membahas hubungan strategis AS-China dalam isu keamanan strategis dan juga ekonomi. Mata uang China yang <i>undervalued</i> juga tetap menjadi perhatian senat AS.
17 September 2003	Kongres ( <i>the House Ways and Means Committee</i> )	Resolusi	Mengeluarkan sebuah resolusi H.Con.Res. 285 (Manzullo) untuk kembali menegaskan perhatian Kongres terhadap manipulasi mata uang oleh pemerintah luar. Secara khusus, <i>bill</i> ini menyebutkan praktek China yang tetap memakai sistem <i>peg</i> sebagai satu manipulasi. Hal ini melanggar Article XV (4) dari the <i>General Agreement on Tariffs and Trade</i> 1994. tindakan ini dianggap tidak dapat dibenarkan, tidak beralasan, membebani dan membatasi perdagangan AS ( <i>China-US</i> , 2004).
21 September 2003	Treasury Department AS (sekretaris : John	Diplomasi	Pada pertemuan <i>the International Monetary and Financial Committee (IMFC)</i> di Dubai. John Snow juga

	Snow)		mengulang lagi mengenai pentingnya <i>market-based economy</i> dan sistem nilai tukar fleksibel bagi ekonomi global
26 September 2003	Senat AS	Resolusi	Senate Resolution 219 dikeluarkan untuk mendorong China dalam membangun sistem harga Yuan berdasarkan pasar.
1 Oktober 2003	Senat AS ( <i>The House Committee on Financial Services</i> )	<i>Hearing</i>	Dilakukan diskusi mengenai pembukaan pasar finansial China. Dalam hearing yang berjudul "China's Exchange Rate Regime and Its Effects on The U.S. Economy" ini, ditekankan pengaruh sistem nilai tukar China bagi perdagangan China-AS dan dampaknya bagi ekonomi domestik AS, terutama dalam lapangan pekerjaan. Beberapa point yang muncul sebagai agenda pemerintah AS dalam mengelola hubungan dagangnya dengan China antara lain: memakai <i>WTO compliance</i> , menekan pemerintah China untuk menghentikan manipulasi nilai tukar mata uangnya, memastikan bahwa produksi di China berdasarkan market dan non-subsidi, melakukan sebuah massive joint public-private trade efforts untuk meningkatkan ekspor AS ke China. (Taylor, 2003)
2 Oktober 2003	Kongres AS	Bill (ancaman hambatan perdagangan)	Kongres menerima Bill S.3328 yang meminta revokasi terhadap hubungan perdagangan yang normal dengan China.
3 Oktober 2003	US – China Business Council	Tekanan	<i>The US-China Business Council</i> mengeluarkan pandangannya mengenai <i>compliance</i> China terhadap WTO.
16-17 Oktober 2003	Senat AS	<i>Hearing</i>	Diadakan <i>hearing</i> untuk membahas peran China di ekonomi dunia dan komitmen perdagangannya.
20 Oktober 2003	Senat AS ( <i>Senate Finance Committee</i> )	Resolusi (ancaman hambatan perdagangan)	Senat mengajukan resolusi S.1758, meminta the Treasury Secretary untuk melaporkan mengenai "China's currency manipulation" ( <i>China-US</i> , 2004) dan kemudian menerapkan tariff sebesar manipulasi tersebut. Diacukan kepada <i>Senate Finance Committee</i> .

				(bill yang sama, H.R. 3058, diperkenalkan pada tanggal 10 Oktober 2003 dan diacukan kepada <i>the House Ways and Means Committee</i> ).
21 Oktober 2003	Kongres AS	<i>Hearing</i>		Kongres melakukan <i>hearing</i> mengenai <i>reassessing</i> hubungan ekonomi AS-China.
24 Oktober 2003,	<i>Treasury Department AS</i> (sekretaris : John Snow)	Pernyataan		John Snow juga memberikan penekanan mengenai isu China ini melalui beberapa pidatonya.
28 Oktober 2003,	Kongres AS	Tekanan <i>compliance</i> WTO		Kongres mengeluarkan H.Res. 414 (English) yang mendorong China untuk memenuhi <i>compliance</i> terhadap WTO, melakukan reformasi moneter dan juga reformasi pasar keuangan. Bill ini diacukan kepada <i>the House Ways and Means Committee</i> dan pada tanggal 29 Oktober 2003 diterima melalui pemungutan suara 411:1.( <i>China-US</i> , 2004)
Oktober 2003,	<i>the Ministry of Commerce AS</i>	Advokasi		<i>the Ministry of Commerce AS</i> membentuk satu tim khusus untuk menangani masalah perdagangan dengan China ini, selain <i>trade representatives</i> yang telah ada.
30 Oktober, 2003	Senat AS, Treasury Department	Diplomasi dan advokasi		<i>The Treasury Department AS</i> memberikan laporan “ <i>Treasury’s Report on International Economic and Exchange Rate Policies</i> ” kepada Senat, <i>Committee on Banking, Housing and Urban Affairs</i> . Secara garis besar, laporan ini memberikan gambaran kebijakan nilai tukar yang dipakai oleh negara-negara partner dagang utama AS. Berdasarkan laporan tersebut, tidak ada negara partner dagang AS yang memenuhi <i>the technical requirements set forth in the Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988</i> yang menyatakan “ <i>The Secretary of the Treasury shall analyze on an annual basis the exchange rate policies of foreign countries, in consultation with the International Monetary Fund, and consider whether countries manipulate the rate of exchange between their currency and</i>

			<p><i>the United States dollar for purposes of preventing effective balance of payments adjustments or gaining unfair competitive advantage in international trade.”. Mengutip pendirian dari pemerintahan Presiden Bush bahwa sistem perdagangan internasional bekerja dengan baik dengan sistem perdagangan bebas, arus modal yang bebas, dan sistem nilai tukar market-based. Karenanya, pemerintahan Bush akan tetap memberikan tekanan diplomatik kepada China untuk melepas nilai tukar peg-nya. Salah satu langkah yang telah diambil adalah dengan menempatkan <i>attaché</i> dari Treasury di kedutaan besar AS di Beijing. (Testimony, 2003)</i></p>
30 Oktober 2003	Senat AS ( <i>Committee on Ways and Means</i> ), Presiden Bush, <i>Treasury Secretary</i>	<i>Hearing</i> , diplomasi	<p>Dilakukan lagi <i>Hearing</i> di Senat, khususnya <i>Committee on Ways and Means</i>, mengenai hubungan ekonomi AS-China dan peran China dalam ekonomi global. John B. Taylor, yang mewakili <i>Secretary of Treasury for International Affairs</i>, menyatakan bahwa China saat ini merupakan actor besar dalam ekonomi internasional. Hubungan ekonomi AS-China juga semakin meningkat baik dalam perdagangan ataupun investasi. Mengenai sistem nilai tukar China, pemerintah AS telah melakukan pendekatan kepada China melalui Presiden Hu Jintao, PM Wen Jiabao, Wakil PM Huang, para petinggi Bank sentral China dan Menteri Keuangan China. Kunjungan yang dilakukan oleh Presiden Bush dan juga <i>Treasury Secretary</i> secara intensif membawa perkembangan yang cukup baik dalam isu ini. Namun, usaha-usaha diplomasi ini harus tetap dilakukan guna mempercepat prosesnya. Hal ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan di dalam negeri AS, penciptaan lapangan kerja.(Taylor, 2003)</p>

19 November 2003	<i>Secretary of Commerce, Donald Evans</i>	Hambatan perdagangan	Pengumuman bahwa pada tahun 2004, AS akan menerapkan <i>emergency quotas</i> terhadap produk tekstil impor dari China. ( <i>China-US</i> , 2004)
21 Januari 2004	Presiden Bush	Tekanan diplomasi	Presiden menyebutkan bahwa “countries like China have got to deal with their currency”. Hal ini diikuti dengan disewanya badan hukum oleh the Fair Currency Alliance untuk menyiapkan draft section 301. (Hufbauer, 2006)
31 Maret 2004	Senat AS ( <i>House Energy and Commerce Committee</i> )	<i>Hearing</i>	Dilakukan hearing dengan tema “U.S.-China Trade: Preparations for the Joint Commission on Commerce and Trade” ( <i>China-US</i> , 2004).
April.2004	Pelaku Dagang China-US	Diplomasi bilateral	the 15 <sup>th</sup> China-US Joint Commission on Commerce and Trade diadakan di Washington
15 April 2004,	Kongres AS, <i>Treasury Department</i>	Dilomasi	Treasury AS ( <i>Report</i> , 2004) memberikan laporan kepada Kongres mengenai “International Economic and Exchange Rate Policies”. Laporan ini menindaklanjuti laporan yang telah diberikan sebelumnya pada tahun lalu. Sampai saat ini Pemerintah AS tetap melakukan negosiasi multilateral dengan China untuk mencapai sistem nilai tukar Yuan yang lebih fleksibel. ( <i>China-US</i> , 2004)
15 April 2004,	<i>Treasury Secretary</i>	Advokasi (penunjukan <i>economic emissary</i> )	Untuk menunjukkan keseriusan pemerintah AS dalam menghadapi isu ini, Paul Speltz, U.S. Executive Director of the Asian Development Bank, ditunjuk sebagai <i>economic emissary</i> di China. Langkah ini diambil untuk mendorong China menghentikan sistem <i>peg</i> terhadap dollar. Penunjukan ini diumumkan oleh sekretaris treasury AS, John Snow. ( <i>China-US</i> , 2004)
21 Juni 2004	<i>Secretary of Commerce AS, Donald L. Evans,</i>	Diplomasi	memulai kunjungan resmi selama tiga hari di China dengan mengunjungi Beijing dan Harbin.
8 September 2004	Senat AS	Legislasi (pemberlakuan <i>quota impor</i> )	H.R. 5026 (Levin) diacukan kepada <i>House Committee on Ways and Means</i> . Legislasi ini meminta Presiden untuk mengambil langkah-langkah

			tertentu untuk memperkuat sektor tekstil dan melindungi dari impor China (Ahearn, 2004). Hal ini termasuk pemberlakuan <i>impor quota</i> terhadap produk tekstil dari China ( <i>China-US, i2004</i> )
7 Oktober 2004	Presiden Bush	Diplomasi	Presiden Bush melakukan pertemuan dengan Presiden Hu Jintao untuk membicarakan beberapa isu dan isu mata uang menjadi salah satunya.
9 Mei 2005	Treasury Department AS	Negosiasi	Dilakukan negosiasi antara <i>middle-level officials</i> dari <i>Treasury Department AS</i> dan Bank Sentral China . Juru bicara <i>Treasury AS</i> , Tony Fratto menyatakan bahwa negosiasi tersebut membawa perkembangan yang konstruktif bagi kedua belah pihak. Walaupun China tidak memberikan pernyataan apapun mengenai langkah yang akan mereka ambil berikutnya, tetapi Fratto menyatakan bahwa tujuan untuk membawa kebijakan nilai tukar China ke arah yang lebih fleksibel sudah semakin dekat. ( <i>China, 2005</i> )
16 Mei 2005	<i>the US Chamber of Commerce</i>	Negosiasi	<i>the US Chamber of Commerce AS</i> melakukan kunjungan ke China dan melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri China Wen Jiabao untuk membahas isu mata uang China. ( <i>China never, 2005</i> )
19 Mei 2005,	Treasury Department AS	Advokasi (penunjukan <i>special envoy</i> )	Treasury AS menunjuk Olin L. Wethington sebagai <i>Special Envoy</i> di China. Wethington bertanggungjawab mengenai <i>direct engagement</i> dengan China terkait dengan isu nilai tukar dan reformasi pasar keuangan China. Penunjukan ini untuk meneruskan dan meningkatkan intensitas <i>constructive dialogue</i> dengan China. Langkah ini dianggap penting, bersamaan dengan berakhirnya penempatan Duta Besar Paul Speltz di China yang selama ini memberikan kontribusi besar bagi perkembangan China yang lebih terbuka. ( <i>Treasury Secretary, 2005</i> )

Walaupun berbagai legislasi telah dikeluarkan oleh pemerintah AS pada periode 2003-2005, setelah Treasury memberikan laporan mengenai nilai tukar China, tekanan yang diberikan oleh AS lebih diarahkan pada *financial diplomacy*, bukan *punitive sanction*. Tekanan AS pada periode ini mengawali tekanan ke tingkat berikutnya yaitu dengan membawa kasus ini ke WTO pada tahun 2006. eskalasi tekanan ini juga dapat diartikan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah China pada Juli 2005 belum cukup akomodatif bagi AS. Ini dikarenakan apresiasi nilai tukar yang dilakukan China belum dianggap cukup memadai. (Hufbauer, 2006).

Tekanan domestik AS terhadap Yuan menjadi sangat politis ketika dikaitkan dengan pemilihan umum Presiden dan Kongres AS pada tahun 2004. Dengan menghubungkan mata uang China dan masalah ekonomi domestik AS (industri dan pengangguran), berbagai spekulasi muncul karena pada sisi lain hal dapat menarik perhatian para konstituen politik AS pada pemilu berikutnya. Tekanan AS dapat kita lihat sebagai upaya mendorong China agar melakukan reformasi sistem nilai tukar lebih cepat dan lebih *intense*. Reformasi sistem nilai tukar yang diharapkan oleh adalah melepas sistem *peg*, memakai sistem nilai tukar yang fleksibel.

### **II.3. Respon Pemerintah China : Penolakan terhadap Tekanan AS**

Respon pemerintah China terhadap tekanan internasional, yang terutama datang dari Amerika Serikat, dapat kita lihat dari pernyataan-pernyataan dari pemerintahan China sendiri. Selain dari Presiden dan Perdana Menteri, respon ini datang dari para petinggi PBC dan badan pemerintah terkait lainnya. Dari pernyataan-pernyataan yang diberikan, dapat kita definisikan penolakan seperti apa yang dilakukan oleh China mengenai isu ini pada periode 2003-2005.

Ketika diadakan *15th meeting of the Sino-U.S. Joint Commission on Commerce and Trade*, Wakil Perdana Menteri China, Wu Yi, menyatakan posisi China dalam *trade dispute* kedua negara. (China-US, 2004). Menurutnya, sistem nilai tukar China bukan penyebab defisit yang dialami AS. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wu Xiaoling, Wakil Gubernur PBC (*Central Bank*, 2005). Tekanan AS untuk melakukan apresiasi terhadap nilai Yuan dianggap akan

menimbulkan banyak kerugian. Hal ini disampaikannya melalui pidatonya pada tanggal 27 April 2005. Pemerintah China ingin dibiarkan dapat memilih kapan untuk menjadikan Yuan lebih fleksibel. Menurutnya, situasi penuh tekanan yang diciptakan oleh AS dapat berdampak memperlambat proses reformasi itu sendiri (*China won't*, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa China tidak menginginkan adanya intervensi dalam proses reformasi nilai tukarnya. Pemerintah China tidak ingin reformasi yang mungkin akan dilakukan diterjemahkan sebagai bentuk pemenuhan terhadap tekanan negara tertentu. Pesan ini terus diulang oleh pemerintah China. Gubernur PBC menyatakan bahwa China hanya akan melakukan reformasi sistem nilai tukarnya berdasarkan tekanan dan insentif dalam negeri. Hal yang senada juga diberikan oleh Wakil Menteri keuangan China, Li Yong, pada rapat *Asian Development Bank* di Istanbul pada Mei 2005. Menurutnya, tekanan bagi China untuk melakukan revaluasi sebenarnya berasal dari kebutuhan domestik, bukan dari luar. Jin Reqing, Menteri Keuangan China juga menyatakan bahwa dengan adanya spekulasi pasar maka semakin sulit untuk melakukan langkah-langkah reformasi. Selain itu, ditegaskan pula bahwa tidak akan mungkin dilakukan apresiasi sebesar 40% seperti spekulasi yang muncul di masyarakat. (*China : Do*, 2005).

Namun, otonomi ini tidak ingin diterjemahkan sebagai ketidakpedulian China terhadap situasi ekonomi internasional. Pemerintah China menyadari besarnya peran China dalam ekonomi dunia, karena itu akan tetap memperhatikan opini dari semua pihak, terutama negara-negara tetangganya, ketika ingin melakukan reformasi sistem nilai tukar. (*Official*, 2005)

Pada tanggal 9 Mei 2005 dilakukan negosiasi antara *middle-level officials* dari Treasury Department AS dan Bank Sentral AS. Pada kesempatan ini, China tidak memberikan pernyataan apapun mengenai langkah yang akan mereka ambil berikutnya. Namun dari pihak AS sendiri menyatakan bahwa tujuan untuk melakukan reformasi sistem nilai tukar China telah semakin dekat. Berbagai spekulasi akhirnya muncul di publik bahwa China akan segera melakukan reformasi tersebut. Perdana Menteri China Wen Jiabao, berulang kali menyatakan secara publik mengenai penolakan China terhadap tekanan yang semakin kuat untuk melakukan revaluasi Yuan. PM Wen memberikan pernyataan ini pada

tanggal 8 Oktober 2004, sehari setelah Presiden Bush menyatakan kepada Presiden Hu Jintao untuk bergerak lebih cepat ke arah sistem yang lebih fleksibel. PM Wen menyatakan bahwa pemerintah China hanya akan mengambil langkah gradual ke arah pembangunan sistem nilai tukar yang lebih fleksibel karena rasa tanggung jawab terhadap rakyat China dan juga memperhitungkan stabilitas pasar keuangan internasional. China sendiri menganggap bahwa langkah-langkah yang telah diambil menunjukkan perkembangan pada banyak sisi, seperti mengurangi larangan dalam arus modal, mengizinkan partisipasi yang lebih besar dari institusi asing pada pasar keuangan. Reformasi sistem nilai tukar belum berhenti dilakukan sejak dimulainya pada tahun 1994. ditegaskan pula bahwa tujuan reformasi mata uang adalah mencapai mata uang yang stabil dan sistem nilai tukar yang fleksibel yang menunjukkan permintaan dan penawaran pasar. (*China stands*, 2004)

Munculnya banyak spekulasi di publik mengenai revaluasi Yuan dikhawatirkan dapat membawa pengaruh buruk bagi situasi keuangan dan arus modal China. Hal ini ditanggapi oleh PM Wen, ketika berada di Laos untuk ASEAN Summit pada November 2004, dengan menyatakan bahwa semakin banyak spekulasi mengenai revaluasi Yuan yang berkembang di masyarakat maka semakin kecil kemungkinan untuk mengambil langkah-langkah revaluasi (*China capable*, 2004). Pada konferensi pers penutupan pertemuan tahunan legislature Maret 2005, PM Wen menyatakan bahwa China sedang bekerja pada rencana untuk sebuah sistem nilai tukar yang lebih fleksibel. Namun, *specific measures* mungkin akan datang secara tidak terduga (*Official*, 2005). Lagi, dikatakan olehnya bahwa pemerintah China melihat masalah reformasi ini sebagai masalah kedaulatan negara. Berbagai usaha politisasi isu ini dianggap tidak kondusif untuk memecahkan permasalahan yang ada. Pada pertemuannya dengan *the US Chamber of Commerce* tanggal 16 Mei 2005, PM Wen menegaskan bahwa bila kondisi tidak memungkinkan, pemerintah China tidak akan pernah mengambil tindakan apapun, walau sebesar apapun tekanan eksternalnya (*China never*, 2005).

Dari deskripsi di atas, dapat kita simpulkan bahwa pemerintah dengan jelas menyatakan bahwa reformasi sistem nilai tukar merupakan isu domestik China. Reformasi yang sedang berjalan tidak akan mengalami perubahan karena tekanan eksternal dalam bentuk apapun. Walaupun China menyadari peran

internasionalnya dalam perekonomian global, sistem ekonomi domestik menjadi pertimbangan utama ketika melakukan reformasi sistem nilai tukar ini. China menolak segala bentuk tekanan eksternal yang datangnya dalam bentuk tindakan diplomatis dan advokasi AS, terlebih yang berupa ancaman pemberlakuan berbagai bentuk hambatan perdagangan produk China. Hal ini ditunjukkan China sebagai bentuk mempertahankan otonomi negara dalam menangani isu domestiknya. Ditambah lagi, revaluasi sekitar 20-40% merupakan satu hal yang akan dicapai pada jangka waktu yang masih lama.



## BAB III

### ANALISA FAKTOR-FAKTOR PENOLAKAN CHINA

Adapun faktor-faktor yang akan dielaborasi pada bab ini pada dasarnya ditarik dari operasionalisasi konsep pada bab pertama. Namun, akan terdapat faktor lain diluar operasionalisasi konsep. Adapun faktor utama dari kerangka pemikiran trilema kebijakan moneter adalah faktor ekonomi (stabilitas nilai tukar dan mobilitas modal), faktor institusi (independensi moneter). Yang akan menjadi tambahan adalah faktor politik dan sejarah.

#### III.1. Faktor Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi China mengalami perkembangan yang sangat signifikan paska reformasi ekonomi tahun 1979. Pertumbuhan ini sebagian besar terjadi pada sektor industri. Sebelum reformasi, penduduk China sangat bergantung pada pertanian, dimana empat dari lima orang penduduknya bekerja di pertanian (pada tahun 1994 hanya satu dari dua orang). Semakin mahalnya harga produk pertanian mendorong *family farms* untuk memakai tenaga kerja dengan semakin efisien. Perkembangan ini mendorong mereka untuk beralih dari sektor pertanian. Pertumbuhan *village enterprise* yang sangat cepat mengakibatkan peralihan jutaan pekerja dari sektor pertanian tradisional ke *higher-value-added manufacturing*. Dengan diberikannya keleluasaan lebih kepada perusahaan, daya saing semakin tinggi. Perusahaan dapat menentukan tujuannya sendiri, menjual sebagian produk di pasar dengan harga yang lebih kompetitif, mekanisme *reward and punishment* terhadap para pekerja, telah membawa perusahaan, - dalam tingkat tertentu-, menjadi lebih efisien. (Hu dan Khan, 1997)

Dengan mengizinkan masuknya investasi asing, *open-door policy* yang diterapkan oleh China menambahkan kekuatan bagi perekonomiannya. Investasi asing mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Pada tahun 1994, *Foreign Direct Investment* (FDI) di China mencapai US\$ 100 milyar. Rata-rata peningkatan pemasukan FDI dari 1% pada tahun 1978, mencapai 18% pada tahun 1994. Modal ini membiayai pembangunan pabrik-pabrik, menciptakan lapangan pekerjaan, menghubungkan China dengan pasar internasional dan membawa pada

transfer teknologi. Perdagangan luar negeri dan investasi asing menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi China. Ketika dikatkan dengan sistem nilai tukar, keduanya akan sangat terpengaruh. Faktor ekonomi yang melatrabelakangi penolakan China berfokus pada kedua aspek ekonomi ini.

Berikut merupakan statistik ekonomi China dari tahun 1997-2003 :

**Tabel 3.1 Statistik Ekonomi China 1997-2003**

<b>Indikator Umum dan Keuangan Republik Rakyat China (Semua figure dalam milyar RMB atau persen kecuali ditentukan berbeda)</b>							
<b>Indikator Utama</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Gross Domestic Product (GDP)	7,446.26	7,834.52	8,206.80	8,946.81	9,731.48	10,479.06	11,669.40
Pertumbuhan GDP Real	8.8	7.8	7.1	8	7.5	8	9.1
Index harga retail	0.8	-2.6	-3	-1.5	-0.8	-1.3	--
Index harga konsumen	2.8	-0.8	-1.4	0.4	0.7	-0.8	1.2
Pendapatan per kapita urban (RMB)	5,140.00	5,425.10	5,854.00	6,280.00	6,860.00	7,702.80	8,500.00
Pendapatan per kapita Rural (RMB)	2,080.00	2,161.98	2,210.34	2,253.42	2,366.40	2,475.60	2,622.00
Tingkat Pengangguran (%)*	3.1	3.1	3.1	3.1	3.6	4	4.4
<b>Indikator Keuangan</b>	<b>1997</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>
M0 supply	1,017.80	1,120.4	1,345.6	1,465.3	1,568.9	1,727.8	2,000
% pertumbuhan dari sebelumnya	15.6	10.1	20.1	8.9	7.1	10.1	14.3
M1 supply	3,482.60	3,895.4	4,583.7	5,314.7	5,987.2	7,088.2	8,400
% pertumbuhan dari sebelumnya	16.5	11.9	17.7	16	12.7	18.4	18.7
M2 supply	9,099.50	10,449.9	11,989.8	13,461	15,830.2	18,500.7	22,100
% pertumbuhan dari sebelumnya	17.3	15.3	14.7	12.3	14.4	16.8	19.6
Nilai tukar (RMB/\$)	8	8.3	8.28	8.28	8.28	8.28	8.28
Foreign exchange reserves (US\$ billion)	139.9	145	154.7	165.6	212.2	286.4	403.3
Defisit Pemerintah	57	92.2	174.4	249.1	251.7	315	319.8
Hutang Domestik (Treasury bond issues)	241.2	322.9	370.2	415.4	448.4	566	--
Hutang Asing	12.61	146	151.8	145.7	170.1	168.5	--

Sumber : PRC National Bureau of Statistics (NBS), China Statistical Yearbook, 2003; Financial Times; Dow Jones News Service; Foreign Broadcast Information Service; Wall Street Journal; Straits Times; People's Bank of China; The Standard; State Administration of Taxation

NOTES: \*Sesuai dengan data resmi NBS, dimana tidak termasuk pengangguran dari penduduk pengungsi

(Sumber : <http://www.uschina.org>, 2003. telah diolah kembali)

### III.1.1. Perdagangan Luar Negeri China

Liberalisasi ekonomi meningkatkan ekspor China 19% dari tahun 1981-1994. pertumbuhan ekspor inilah yang menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi China. Total ekspor terhadap GDP (*Gross Domestik Product*) mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dengan rasio 36%. Karena itu, tidaklah mengherankan bila banyak yang menyimpulkan bahwa ekspor menguasai 1/3 ekonomi China dan kontribusi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi (Anderson, 2007). Pada tahun 1997, China telah menjadi negara dagang terbesar ke-sepuluh di dunia (Anderson, 2007).

Ekspansi ekonomi domestik China terutama perdagangan internasionalnya, merupakan hasil dari reformasi ekonomi. Hal ini dikarenakan, reformasi ekonomi mengubah strategi pembangunan dari yang berorientasi ke dalam (*inward*) menjadi orientasi ke luar (*outward*). Terhubungnya pertumbuhan ekonomi domestik dengan kondisi yang *receptive* dari luar, membawa perdagangan internasional China memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonominya. (Anderson, 2007)

#### III.1.1.1. Reformasi Perdagangan Luar Negeri China

Reformasi perdagangan luar negeri China mengalami empat fase yang menentukan. Fase pertama adalah dari tahun 1979-1984. Pada masa ini, langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam rangka mengutamakan peningkatan ekspor dan penghasilan valuta asing. Desentralisasi perusahaan ekspor, devaluasi nilai mata uang berhasil meningkatkan volume perdagangan China. Fase berikutnya terjadi pada periode 1985-1987, dimana *Ministry of Foreign Economic Relations and Trade* (MOFERT) memandang perlunya rerormasi lebih lanjut. Pemerintah diminta untuk mengurangi komoditi-komoditi ekspor yang harus melewati *central planning* dan memberikan wewenang yang lebih besar pada FTCs. Selain itu, pada masa ini sistem nilai tukar juga memegang peranan penting. Pemerintah melakukan devaluasi terhadap nilai tukar resmi beberapa kali. Perkembangan yang lebih penting pula adalah pendirian *swap market* di *Special Economic Zones* (SEZ) dan kota-kota besar lainnya. Institusionalisasi perdagangan luar negeri juga terjadi pada periode ini. kontrol yang ketat dari

pemerintah mulai digantikan oleh peraturan-peraturan. Pada akhirnya, ini memampukan produsen domestik untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan pasar internal dan eksternal dengan lebih cepat. (Anderson, 2007)

Pada fase ketiga, 1988-1993, pencapaian efisiensi dan pengaturan *foreign exchange earnings* menjadi fokus reformasi. FTCs diwajibkan untuk mencapai tiga target yaitu *foreign exchange earnings* dari ekspor, pemberian *foreign exchange* ke *central budget*, dan penetapan *cost ceiling* terhadap ekspor. Selain itu, pemerintah memperbaiki bantuan finansial dan subsidi perdagangan. Keberhasilan dalam reformasi ekspor dinilai sangat penting. Untuk mendirikan ‘a managed open trading system’, quota ekspor-impor mengalami pemeriksaan dan perubahan. Pemerintah mengambil langkah-langkah ini juga dikarenakan untuk dapat masuk kembali ke GATT (the General Agreement on Tariffs and Trade) atau WTO (World Trade Organization). Fase keempat ditandai dengan reformasi pajak dan keuangan yang lebih berani, dimana rejim nilai tukar memegang peran yang paling penting. Pada awal tahun 1994, ketika sistem nilai tukar dual track dihapuskan, *foreign exchange retention system* dihapuskan dan mata uang asing dapat diperdagangkan di Bank of China. Kembali, langkah ini meningkatkan ekspor China yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara agregat. (Lin dan Schramm, 2003)

Monopoli negara dalam perdagangan luar negeri dilakukan dengan mengontrol perusahaan-perusahaan perdagangan, komoditas ekspor, pengaturan harga dan valuta asing. Reformasi perdagangan yang dialami China dapat dilihat sebagai satu proses gradual terhadap pengurangan, pengalihan dan penghapusan kontrol negara di dalam bidang-bidang tersebut. Dari keempat skema tersebut, dua terakhir adalah yang paling terkait dengan nilai tukar. (Lin dan Schramm, 2003)

Untuk memisahkan pasar internal dan eksternal, komoditas perdagangan harus mendapat pengaturan harga secara independen. Kebijakan ini membuat struktur harga domestik berbeda dengan harga internasional. Komoditas ekspor mendapatkan pengaturan harga domestik, tanpa memperhatikan permintaan terhadapnya. Reformasi yang dilakukan terkait dengan pengaturan ini adalah dengan memberikan wewenang ini kepada perusahaan, walau tetap dengan pengawasan pemerintah. Seiring dengan liberalisasi pasar, maka produk ekspor

tidak lagi membutuhkan kebijakan harga yang terpisah. Tidak jauh berbeda dengan barang impor yang harganya harus di-*peg* terhadap harga produk domestik yang *comparable*. Untuk melindungi produsen domestik, mark-up terhadap harga barang impor juga dilakukan. Reformasi dalam *pricing policy* ini mengalami proses yang cukup lama. Sampai pada tahun 1980an, subsidi impor masih menjadi beban bagi pemerintah. (Anderson, 2007)

Instrumen perdagangan yang juga penting adalah kontrol terhadap valuta asing. Sebelum reformasi, nilai valuta asing dan alokasinya tidak memiliki hubungan. Dua langkah utama dalam reformasi sistem nilai tukar ini adalah dengan desentralisasi sistem dan juga dengan melakukan devaluasi secara gradual. Tujuan akhir dari reformasi ini adalah untuk membuat mata uang (RMB) menjadi konvertibel secara internasional. Kontrol terhadap nilai tukar telah memainkan peran penting dalam sistem perdagangan China sejak lama. Hal ini dicapai dengan mengontrol valuta asing dengan ketat. Ketika nilai RMB mengalami overvalued dan permintaan terhadap impor tidak dapat ditekan, kontrol terhadap valuta asing harus rigid. Transaksi yang terkait dengan mata uang asing dilakukan dengan terpusat. Pendapatan dan pemakaian valuta asing diatur secara terpisah. Pemilikan mata uang asing oleh perusahaan domestik dilarang dengan keras. (Anderson, 2007)

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa perdagangan luar negeri memegang peranan penting dalam perekonomian China. Reformasi secara bertahap yang dilakukan pemerintah China berhasil mendorong perdagangan luar negeri. Perhatian yang diberikan pemerintah terhadap kontrol mata uang dalam kaitannya dengan nilai valuta asing menunjukkan bahwa nilai tukar memiliki peran yang krusial dalam perdagangan luar negeri itu sendiri. Akan tetapi, harus tetap diperhatikan bahwa perdagangan luar negeri bukanlah satu-satunya faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi China. Terdapat faktor lain, seperti investasi asing yang juga terkait erat dengan nilai tukar.

### **III.1.1.2. Perdagangan Luar Negeri China – Amerika Serikat**

Peningkatan ekspor China secara agregat menunjukkan peningkatan ekspor ke negara-negara *trading partner* utamanya. China memang mendapatkan

surplus perdagangan dari perdagangannya.. Dan tidak mengherankan bila negara-negara tertentu mengalami defisit perdagangan dengan China. Berikut merupakan daftar negara-negara trading partner terbesar China selama tahun 2002-2003.

**Tabel 3.2 Negara Trading Partner China**

<b>Partnet Dagang Utama China (US\$ million)</b>				
<b>No</b>	<b>Negara</b>	<b>2003</b>	<b>% Change</b>	<b>Rank 2002</b>
1	Japan	133,573.4	31.1	1
2	United States	126,334.4	30.0	2
3	Hong Kong	87,407.7	26.3	3
4	South Korea	63,231.1	43.4	5
5	Taiwan	58,367.0	30.7	4
6	Germany	41,876.3	50.7	6
7	Malaysia	20,127.8	41.0	7
8	Singapore	19,352.3	37.9	8
9	Russia	15,760.6	32.1	9
10	The Netherlands	15,438.7	44.6	10

**Source: PRC General Administration of Customs, China's Customs Statistics**

(Sumber: [www.uschina.org](http://www.uschina.org), 2003, telah diolah kembali)

AS, sebagai *trading partner* kedua terbesar China setelah Jepang, juga mengalami trade defisit dengan China. Nilai perdagangan bilateral kedua negara terus mengalami peningkatan, begitu pula dengan nilai *trade deficit* yang dialami AS. Pada tahun 2003, total ekspor China ke AS mencapai US\$ 163,3 Milyar dan total impor dari AS ke China US\$ 28,4 Milyar, yang meninggalkan *trade deficit* di AS sekitar US\$ 134,9 Milyar. Komoditas perdagangan antara kedua negara didominasi oleh produk-produk industri seperti alat-alat elektronik, mainan, *furniture*, alat medis dan lainnya. Berikut merupakan tabel komoditas perdagangan China-AS.

Tabel 3.3 Komoditas Perdagangan China-AS tahun 2003

Perdagangan AS dengan China, Top 10 Ekspor dan Impor 2003 (\$ million)					
Ekspor AS ke China			Impor AS dari China		
Item	2003	% Perubahan	Item	2003	% Perubahan
Electrical machinery & equipment	4,782.6	21.1	Power generation equipment	31,039.8	47.3
Power generation equipment	4,639.6	12.9	Electrical machinery & equipment	30,043.1	18.2
Oil seeds & oleaginous fruits	2,877.4	213.5	Toys & games	17,399.9	12.3
Air & spacecraft	2,451.2	-28.5	Furniture	13,670.4	21.8
Medical equipment	1,594.0	26.6	Footwear & parts thereof	11,144.8	3.5
Plastics & articles thereof	1,247.5	25.4	Apparel	9,156.8	22.5
Iron & steel	1,213.9	105.4	Leather & travel goods	5,440.6	13.8
Organic chemicals	1,105.3	78.3	Plastics & articles thereof	4,779.9	15.3
Cotton	769.3	401.6	Iron & steel	3,855.5	24.6
Copper	652.3	104.1	Medical instruments	3,386.9	17.8
<b>TOTAL EKPOR KE CHINA</b>	<b>28,400.0</b>	<b>28.5</b>	<b>TOTAL IMPOR DARI CHINA</b>	<b>163,300.0</b>	<b>22.3</b>
Sumber: KOMisi Perdagangan Internasional AS, Departemen Perdagangan					

(Sumber: [www.uschina.org](http://www.uschina.org), 2003, telah diolah kembali)

Peningkatan perdagangan antara China-AS terjadi dua arah. Walau ekspor China dengan AS mengalami peningkatan tiap tahunnya, begitu pula dengan ekspor AS ke China. China sendiri merupakan pasar terbesar ketiga bagi produk AS, setelah Kanada dan Meksiko. Bahkan, China merupakan pasar yang paling cepat pertumbuhannya bagi produk AS (*US-China trade*, 2006). Hal ini menunjukkan bahwa wajar bila *trade deficit* yang dialami oleh AS mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan total perdagangan kedua negara. Berikut merupakan data peningkatan hubungan dagang China –AS periode 1998-2005.

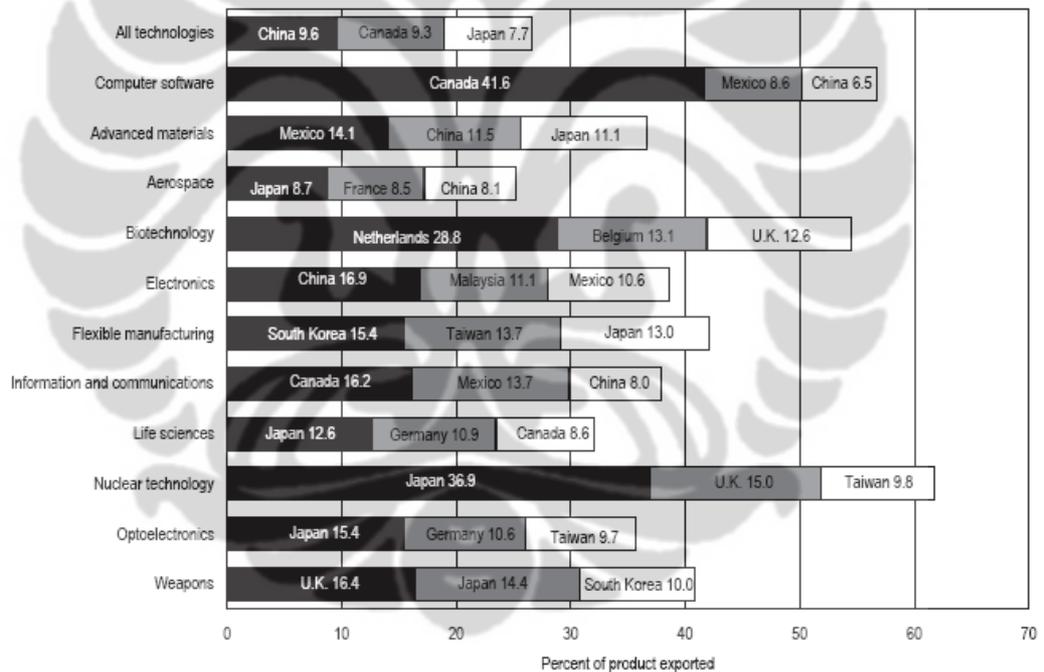
**Tabel 3.4 Statistik Perdagangan China – AS priode 1998-2005**

Perdagangan China dengan AS (\$ milyar)								
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Ekspor AS	14.3	13.1	16.3	19.2	22.1	28.4	34.7	41.8
% perubahan	10.9	-8.0	24.4	18.3	15.1	28.5	22.2	20.6
Impor AS	71.2	81.8	100.0	102.3	125.2	152.4	196.7	243.5
% perubahan	13.8	14.9	22.3	2.2	22.4	21.7	29.1	23.8
Total	85.5	94.9	116.3	121.5	147.3	180.8	231.4	285.3
% perubahan	13.4	11.0	22.6	21.4	21.2	22.8	28.0	23.3
Balance AS	-56.9	-68.7	-83.7	-83.0	-103.1	-124.0	-162.0	-201.6

Sumber: Komisi perdagangan Internasional AS, Departemen Perdagangan, dan Biro Sensus AS

(Sumber: [www.uschina.org](http://www.uschina.org)<sup>2005</sup>, telah diolah kembali<sup>1</sup>)

Berikut merupakan grafik yang menunjukkan pasar ekspor bagi produk AS, dimana China memegang proporsi besar di dalamnya.



SOURCE: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, special tabulations (2007).

**Gambar 3.1. Grafik Persentase Pasar Ekspor AS per Kelompok Komoditas**

(Sumber: [www.uschina.org](http://www.uschina.org)<sup>2005</sup>, telah diolah kembali<sup>1</sup>)

Fakta mengenai besarnya nilai perdagangan China-AS tidak menjadikan China sebagai sumber defisit utama dan satu-satunya dalam neraca perdagangan

AS. Defisit perdagangan AS juga datang dari negara-negara lain. Bahkan secara total, defisit perdagangan AS dengan Asia Timur (termasuk China) mengalami penurunan dari 75% pada tahun 1998 menjadi 49% pada tahun 2007. Defisit perdagangan AS secara global memang mengalami peningkatan. Berikut merupakan persentase defisit perdagangan AS.

**Tabel 3.5 Defisit Perdagangan AS secara Global**

Urut	Negara	Expor	Impor	Total	Balance	Persentase
---	Total, Semua Negara	603,9	1.073,40	1,677.4	-469,50	100.0%
---	Total, Top 15 Negara	454	810,5	1,264.5	-356,50	75.4%
1	Kanada	140,4	189,7	330.1	-49,30	19.7%
2	Meksiko	81,4	114,8	196.2	-33,40	11.7%
3	China	25,5	139,9	165.4	-114,40	9.9%
4	Jepang	40,4	95,6	136.0	-55,20	8.1%
5	Republik Jerman	23,2	56,3	79.5	-33,10	4.7%
6	Inggris	26,8	33,8	60.6	-7,00	3.6%
7	Republik Korea	19,8	34	53.8	-14,20	3.2%
8	Taiwan	15,8	25,6	41.4	-9,80	2.5%
9	Perancis	15,3	22,7	38.0	-7,40	2.3%
10	Malaysia	8,1	20,6	28.7	-12,50	1.7%
11	Italia	7,8	20,8	28.6	-13,00	1.7%
12	Irlandia	5,9	21,2	27.7	-15,30	1.6%
13	Singapur	1,3	11,5	26.9	-10,20	1.6%
14	Belanda	17,8	8,9	26.7	8,90	1.6%
15	Brazil	10,4	15,2	25.7	-4,80	1.5%

(Sumber : Foreign Trade Statistic US Census Bureau, 2003, telah diolah kembali)

Statistik perdagangan bilateral kedua negara menunjukkan bahwa :

Perdagangan AS – China memang terus mengalami peningkatan, dimana kedua negara sama-sama menjadi pasar ekspor bagi satu dan yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa China juga membantu produktivitas ekonomi AS sebagai negara tujuan ekspor.

Dengan total perdagangan yang meningkat, maka secara wajar nilai defisit perdagangan AS juga semakin besar.

Defisit yang dialami AS tidak berasal dari China saja, sehingga bila adjustment harus dilakukan, seharusnya dilakukan dengan negara-negara lainnya. Hal ini terkait pula dengan metode *adjustment* yang selama ini

dipakai di sistem moneter internasional dimana beban tersebut diberikan kepada negara yang mengalami defisit. Ini menjadi *precedent* dimana AS menginginkan penyesuaian dilakukan oleh China, sebagai negara yang mengalami surplus.

Berbagai intervensi negatif dalam hubungan perdagangan China-AS akan merugikan kedua belah pihak. Menyadari akan hal ini, akhirnya tekanan AS diarahkan pada diplomasi dan advokasi.

Paparan di atas menunjukkan preferensi pemerintah China untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar dalam skema trilema kebijakan moneter.

### **III.1.2. Mobilitas Modal dan Investasi Asing di China**

Pembahasan mengenai sistem finansial China secara mendalam di literatur finansial internasional masih sangat jarang (Boyreau-Debray dan Shang-Jin, 2004). Di tengah maraknya integrasi finansial secara global dimana mobilitas modal secara internasional dianggap menjadi pilihan terbaik, sistem finansial China dianggap menjadi satu kontroversi. Ini menjadikan fokus pembahasan ada pada inefisiensi sistem finansial yang dikuasai oleh pemerintah tersebut. Namun, dalam penelitian ini akan ditunjukkan bagaimana pilihan ini menjadi pilihan terbaik bagi China pada masa sekarang.

Ketika negara-negara di dunia menerapkan *private-sector-driven financial system*, China mempertahankan *government-dominated financial system*. Dominasi ini ada dalam dua bentuk, yaitu entry barriers terhadap bank komersial, bank investasi dan *financial services* lainnya diatur dengan ketat oleh pemerintah. Hal ini untuk mempertahankan konsentris sector keuangan di badan milik pemerintah. Kedua, pemerintah pusat dan lokal secara aktif melakukan intervensi pasar dengan mengarahkan pinjaman bank dengan mendorong atau melarang. (Boyreau-Debray dan Shang-Jin, 2004)

Mobilitas modal di China sendiri datang dari tiga saluran yaitu :

1. investasi *cross-regional* oleh perusahaan dan pemerintah
2. pinjaman *cross-regional* oleh sistem perbankan
3. peningkatan modal melalui sumber luar (pasar saham)

Memang tidak terdapat larangan secara formal mengenai perpindahan modal dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Namun, pemerintah mendominasi ekonomi dengan berbagai cara. Pemerintah menciptakan *fiscal incentive* untuk memisahkan pasar modal nasional. Hal ini mengakibatkan pemerintah lokal sangat enggan melihat keluarnya modal dari wilayahnya. Hal ini akan dinilai sebagai *revenue loss* bagi wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah lokal juga menghindari kehilangan perusahaan yang menampung banyak lapangan pekerjaan. Akibatnya, berbagai bentuk merger dan akuisis perusahaan terjadi secara lokal. Secara kontras, pemerintah pusat secara aktif melakukan distribusi ulang antar wilayah. Peminjaman oleh Bank Sentral memegang peranan utama sebagai instrument kebijakan alokasi sumber modal. Redistribusi oleh PBC dilakukan juga melalui cabang lokal PBC.

Logika ekonomi dalam mobilitas modal mengatakan bahwa modal akan bergerak ke tempat yang lebih produktif sehingga hal ini akan memacu pertumbuhan ekonomi. Inilah yang disebut dengan pasar modal yang efisien. Hal ini dibatasi oleh pemerintah China dengan mengatur distribusi modal. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan sumber modal di daerah-daerah tertentu, seperti daerah coastal yang menjadi pusat industri. Pemerintah China mengarahkan arus modal ke wilayah-wilayah yang kurang produktif seperti provinsi Mingxia, Qinghai, Xinjiang, Shaanxi. (Boyreau-Debray dan Shang-Jin, 2004)

Sumber pendanaan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu :

- penyesuaian budget oleh pemerintah yang ditandai dengan pemberian modal dan proyek
- pinjaman dari bank dan institusi keuangan lainnya kepada perusahaan lokal
- investasi asing (FDI)
- “self-raised funds” oleh institusi dengan mengeluarkan saham dan obligasi
- investasi lainnya diluar kategori diatas.

Dari kategori di atas, hanya FDI dan “self-raised funds” yang mengikuti prinsip efisiensi pasar modal yang akan mengalir ke tempat yang produktif. Ini menunjukkan pemerintah China ingin melakukan penyeimbangan alokasi sumber modal tersebut. Hal ini dapat dijelaskan melalui sisi ekonomi-politik, dimana

pemerintah China ingin mencapai distribusi wealth secara merata. Secara sosial, hal ini bertujuan untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran di wilayah yang kurang produktif. (Boyreau-Debray dan Shang-Jin, 2004)

Mobilitas modal tidak mengakibatkan FDI di China mengalami penurunan. FDI di China mengalami peningkatan yang sangat tinggi paska reformasi 1979. China merupakan negara penerima FDI terbesar di dunia setelah AS. Hal ini harus dilihat dan Sektor industri manufaktur menjadi pusat investasi di China. Ini dapat kita lihat dari banyaknya *Foreign-Owned Enterprises (FOEs)*. Pada tahun 1980an, proporsi FDI hanya 2,5% dari total investasi nasional, tapi pada tahun 1997, proporsinya mencapai 15%. *Share* dari FOEs terhadap national industrial output mengalami peningkatan dari 7,5% di tahun 1992, menjadi 20% di tahun 1996. terlebih lagi pada perdagangan nasional, dimana persentasenya mencapai 47% di tahun 1996. kontribusi perusahaan-perusahaan ini kepada pajak menjadi dua kali lipat selama 1992-1993, yaitu dari RMB10,7 juta menjadi RMB20,6 juta. Pada tahun 1996, persentase pajak FOEs terhadap total pendapatan pajak nasional adalah 10%. Terlebih, perannya dalam penciptaan lapangan pekerjaan juga sangat besar. Mereka menampung sekitar 9,6 juta pekerja di daerah industri urban. Jadi, manifestasi pengaruh FDI terhadap perekonomian China tidak hanya dalam bentuk pertumbuhan industri, tapi memberikan efek domino ke perekonomian melalui ekspor, pajak, lapangan pekerjaan. (Zhu, Webber & Wang, 2003)

FDI AS di China juga mengambil proporsi yang besar dimana AS merupakan negara keempat sebagai investor FDI di China. Berikut tabel FDI di China.

**Tabel 3.6 Daftar 10 Besar Investor di China tahun 2003**

<b>Top 10 Negara/Wilayah yang Berinvestasi di China, 2003</b>			
<b>Wilayah</b>	<b>Jumlah Kontrak</b>	<b>Total Kontrak (\$ Juta)</b>	<b>Total Digunakan (\$ juta)</b>
Hong Kong	13,633	40,708.03	17,700.10
Virgin Islands	2,218	12,664.16	5,776.96
Jepang	3,254	7,955.35	5,054.19
Republik Korea	4,920	9,177.16	4,488.54
Amerika Serikat	4,060	10,161.47	4,198.51
Taiwan	4,495	8,557.87	3,377.24
Singapur	1,144	3,418.73	2,058.40
Samoa Barat	678	2,584.38	985.72
Cayman Islands	217	1,694.53	866.04
Jerman	451	1,390.92	856.97

(Sumber: China Economic Statistics, 2003, telah diolah kembali)

Berikut merupakan pertumbuhan FDI di China secara total dan yang berasal dari AS.

**Tabel 3.7 FDI di China periode 1998-2005**

<b>FDI di China (Total dan AS) 1998-2005</b>								
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
<b>Total Foreign Direct Investment (FDI)</b>								
Jumlah Kontrak*	19,799	16,918	22,347	26,139	34,171	41,081	43,664	44,019
Jumlah yang dikontrak (\$ milyar)	52.10	41.22	62.38	69.20	82.77	115.07	153.48	189.0
Jumlah dipakai (\$ milyar)	45.46	40.32	40.72	46.88	52.74	53.51	60.63	60.33
<b>Investasi Langsung AS</b>								
Jumlah Kontrak*	2,238	2,028	2,609	2,594	3,363	4,060	3,925	3,741
Jumlah yang dikontrak (\$ milyar)	6.48	6.02	8.00	7.51	8.20	10.16	12.17	NA*
Jumlah dipakai (\$ milyar)	3.90	4.22	4.38	4.86	5.40	4.20	3.94	3.06
<b>Share AS dalam Investasi digunakan</b>	8.50%	10.47%	10.76%	10.37%	10.24%	7.85%	6.50%	5.07%

(Sumber: [www.uschina.org](http://www.uschina.org), 2005, telah diolah kembali)

Sistem finansial China menunjukkan bagaimana pemerintah tetap memainkan peran yang penting dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang

merata. Hal ini menjadi satu fenomena di dunia finansial internasional dimana efektivitas finansial tidak harus mengikuti standard institusi internasional dimana mengutamakan mobilitas modal yang tinggi. Pemerintah China mengirbankan mobilitas demi mencapai distribusi merata dan ternyata hal ini berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonominya. Redistribusi modal yang dilakukan oleh pemerintah China mungkin untuk dilakukan karena adanya FDI yang tinggi. Karenanya, reformasi sistem nilai tukar China sangat mempertimbangkan faktor ini. Berbagai spekulasi mengenai nilai tukar tidak memberikan dampak yang baik bagi investasi di China. Karena FDI ini berhubungan erat dengan industri China yang *export-oriented*. Bila revaluasi RMB mempengaruhi *demand* terhadap ekspor dari China, maka hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi FDI yang masuk ke China. Karenanya pemerintah berusaha menjaga kestabilannya.

### **III.1.3. Otonomi Kebijakan Moneter**

Berdasarkan kedua faktor ekonomi sebelumnya, yaitu stabilitas nilai tukar dan mobilitas modal, otonomi kebijakan moneter merupakan faktor yang sangat penting dalam mendukung keduanya berjalan dengan baik. Secara eksplisit, disebutkan bahwa tujuan kebijakan moneter China adalah mempertahankan stabilitas nilai mata uang yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (the People's Bank of China, 2005). Pasal 12 dalam the Law of the People's Republic of China (PBC) menyatakan bahwa "*the People's Bank of China is to establish a monetary policy committee, whose responsibilities, composition and working procedures shall be prescribed by the State Council and shall be filed to the Standing Committee of the National People's Congress. The Monetary Policy Committee shall play an imporant role in macroeconomic management and in the making and adjustment of monetary policy.*" (the People's Bank of China, 2005)

Peraturan yang berlaku di dalam Komite Kebijakan Moneter ini mengatur bahwa komite ini adalah sebuah *consultative body* dalam pembuatan kebijakan moneter di PBC. Komite ini bertanggungjawab memberikan nasehat dalam formulasi dan penyesuaian kebijakan moneter dan target kebijakan untuk jangka waktu tertentu, penerapan instrumen kebijakan moneter, pengukuran kebijakan

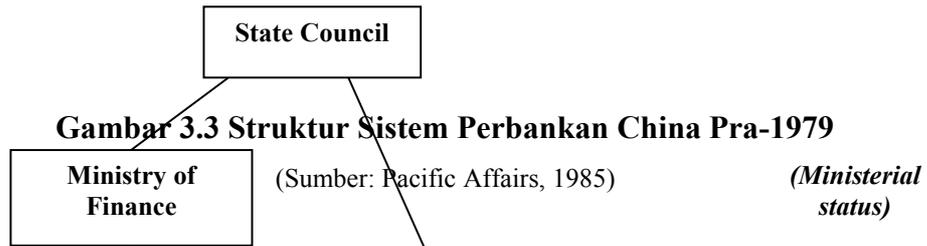
moneter dan koordinasi antara kebijakan moneter dan kebijakan makroekonomi lainnya. Komite menjalankan tugasnya berdasarkan penelitian yang komprehensif terhadap situasi makro-ekonomi dan target yang ditetapkan oleh pemerintah. (the People's Bank of China, 2005)

Komite kebijakan moneter terdiri dari Gubernur PBC dan dua Deputi Gubernur, seorang Deputi Sekretaris-Jenderal State Council, seorang Wakil Menteri Pembangunan Negara dan Komisi Reformasi, seorang Wakil Menteri Keuangan, Administrator dari *State Administration of Foreign Exchange*, Ketua dari *China Banking Regulatory Commission*, Ketua *China Securities Regulatory Commission*, Ketua *China Insurance Regulatory Commission*, Komisioner *National Bureau of Statistics*, Presiden dari *the China Association of Banks*, dan juga para ahli dari kalangan akademisi. Komite ini menjalankan tugasnya melalui rapat reguler tiap tiga bulan. Akan tetapi *ad-hoc meeting* dapat diadakan bila diajukan oleh ketua atau diminta oleh lebih dari 1/3 anggota komite. Hasil rapat berupa opini atau *policy advice* yang disetujui oleh lebih dari 2/3 anggota Komite, harus ditambahkan pada *the proposed decisions* dari PBC mengenai annual money supply, suku bunga, nilai tukar atau isu moneter penting lainnya, untuk disetujui oleh *State Council* (the People's Bank of China, 2005). Instrumen kebijakan moneter yang diterapkan oleh PBC termasuk *reserve*, suku bunga dasar Bank Sentral, *rediscounting*, peminjaman oleh Bank Sentral, operasi pasar terbuka dan instrumen lainnya yang dispesifikasikan oleh *State Council*. (the People's Bank of China, 2005)

Berbicara mengenai sistem moneter maka akan senantiasa terhubung dengan sistem perbankan dan keuangan dimana bank sentral sebagai institusi utamanya. Sebelum reformasi perbankan pada tahun 1980an, PBC berfungsi untuk mengeluarkan mata uang, menerima simpanan dari publik, menyediakan pinjaman kepada perusahaan milik Negara di bawah perencanaan pusat. Pada masa ini fungsi sistem perbankan China sebagai *financial intermediary* sangat terbatas. Dua peran sistem perbankan pada masa ini adalah menyediakan sejumlah pinjaman dan mata uang dan memonitor stabilitas harga. Kedua yaitu mengawasi pengaturan keuangan di perusahaan milik negara. Dari sudut pandang institusional, sistem perbankan China pada masa ini bersifat monolitik, terpusat,

dan terstruktur secara hirarki. Seluruh kegiatan perbankan terpusat pada PBC. Pada akhir tahun 1978 sendiri, hanya terdapat dua bank khusus yaitu the Bank of China dan the People's Construction Bank of China, stau perusahaan asuransi (the People's Insurance Company of China), dan cabang-cabang perkreditan kecil lainnya. Berikut merupakan bagan sistem perbankan China pada masa sebelum reformasi (pra-1979).





**Gambar 3.3 Struktur Sistem Perbankan China Pra-1979**

(Sumber: Pacific Affairs, 1985)

(*Ministerial status*)

Adapun yang menjadi arahan operasional dalam sistem perbankan China pada masa ini, ditentukan secara terbatas. Secara (*Intermediate status*) at diringkaskan menjadi lima point sebagai berikut. (Imai, 1985)

6. Pengaturan pinjaman dalam kerangka *state planning*

Manajemen pada masa Bank of China diatur untuk mengatur pemakai tingkat produk dan jasa yang akan dihasilkan. Dalam prakteknya, hal ini dilakukan dengan n... tasi kredit ke unit-unit ekonomi sesuai dengan dua rencana ut... mian. (*Subdivision*) tu adalah pertama untuk produksi dan distribusi, yang diatur oleh the State Planning Commission, kedua untuk state budg... h Menteri Keuangan. Sistem yang prudent sangat dibutuhkan... litas harga.

7. Kontrol yang ketat terhadap uang beredar

Para pelaku moneter menjaga batas transaksi tunai dan secara konstan menjaga jumlah uang beredar. Disadari bahwa transaksi langsung akan terjadi pada level harian dan per orang dan dapat menaikkan harga barang-barang konsumsi serta inflasi. Karena itu, pemerintah sangat membatasi pemakaian transaksi tunai pada level perusahaan, unit administrasi, dan masyarakat. Pemerintah mendorong peningkatkan simpanan dan tabungan dengan melakukan “saving campaigns” yang menekankan tanggung jawab moral masyarakat untuk menyimpan uang dalam bentuk tabungan.

8. Supervisi terhadap Manajemen Perusahaan

Sistem perbankan melakukan pengawasan dalam implementasi state plan pada level mikro. Hal ini dicapai dengan mengawasi manajemen keuangan setiap perusahaan milik negara.

9. Kontrol ketat dalam Transaksi Internasional

Pemerintah berusaha menghindarkan domestik ekonomi dari pengaruh lingkungan ekonomi internasional. PBC menetapkan nilai tukar tetap mata uang daripada

membiarkannya sesuai pasar nilai tukar aing. Pemerintah memonopoli perdagangan internasional dan memisahkan penetapan harga domestik dari harga pasar internasional. Sebelum reformasi ekonomi, kebijakan ini diperkuat dengan membatasi penerimaan investasi dan pinjaman asing dan juga dengna menjaga keseimbangan perdagangan luar negeri dalam periode yang cukup lama.

#### 10. Konsentrasi Fungsi di PBC

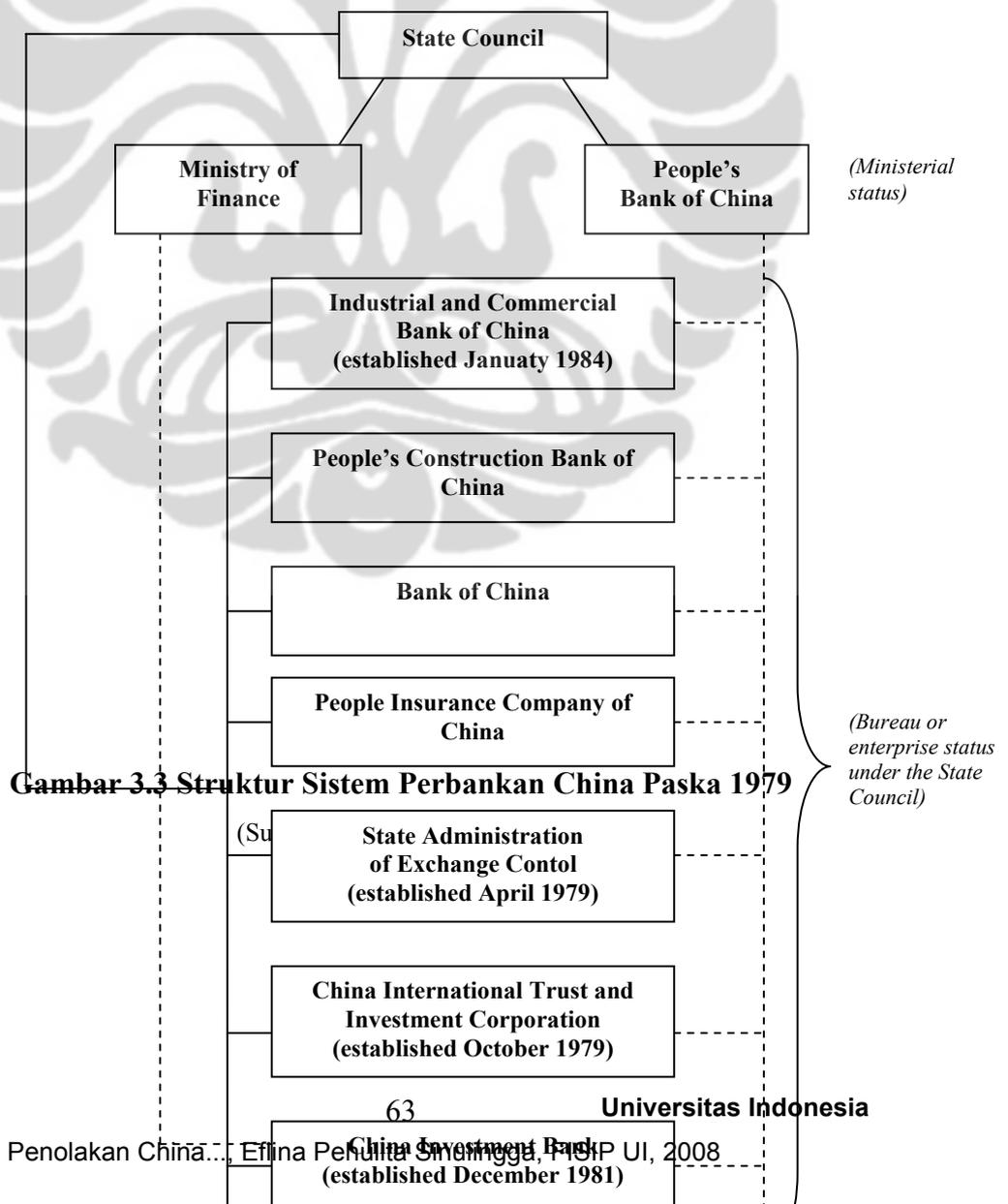
Pada masa ini, PBC bertindak sebagai bank sentral, bank komersial, dan bank tabungan. Hampir seluruh fungsi ini dilakukan sendiri. Pada saat yang bersamaan, pemerintah mempertahankan struktur organisasi perbankan secara hierarki dan seragam dari pusat sampai ke cabang.

Untuk menjalankan fungsinya dengan lebih baik, sistem perbankan China telah mengalami reformasi sejak 1978. Empat komponen utama dalam reformasi sistem perbankan : desentralisasi administrasi ekonomi, adopsi mekanisme pasar secara parsial, penggunaan economic means (pajak, pinjaman, suku bunga, mekanisme harga) secara lebih luas, liberalisasi aktiitas usaha swasta secara parsial. Dalam konteks reformasi ekonomi ini, pemerintah menyadari potensial sistem perbankan untuk mengalokasikan dana secara efisien, meningkatkan kegiatan ekonomi, dan mempertahankan stabilitas harga melalui perangkat non-administrasinya. Sebagai bagian integral, reformasi institusional dan fungsional sistem perbankan mulai dilakukan setelah 1979. (Imai, 1985)

Tindakan pertama yang dilakukan adalah reorganisasi sistem perbankan. Pada tahun 1983, PBC secara resmi dinyatakan sebagai bank sentral China, walau belum menjalankan fungsi bank sentral secara sepenuhnya. Terdapat empat bank khusus di China yaitu The Industrial and Commercial Banks, The Agricultural Bank, The People's Construction Bank, dan the Bank of China yang menangani transaksi asing. Ketiga bank pertama diberikan otonomi untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan milik Negara sesuai arahan pemerintah pusat. Dengan adanya desakan dari kepentingan politik local, maka bank-bank ini mengalami ekspansi pinjaman secara berlebih yang membawa pada inflasi di tahun 1985, 1988, dan 1993. Cara penghentian ekspansi kredit ini adalah dengan menetapkan quota kredit. Pada tahun 1995, PBC secara legal menjadi bank sentral modern dan satu the Commercial Bank. Pada tahun 1994, pemerintah

mengeluarkan “policy bank” untuk mengurangi tekanan politik untuk memberikan kredit. Pemerintah membentuk bank berdasarkan wilayah pembangunan ekonomi tertentu yaitu the State Development Bank, the Agricultural Development Bank, and the Impor and Ekspor Bank. Sejak tahun 1990an, mulai bermunculan bank-bank komersial dalam bentuk korporasi dengan pemilik saham dan dewan direksi. Hanya Bank of Communication yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah pada berbagai level dewan direksi. Bank komersial lainnya umumnya dikuasai perusahaan-perusahaan swasta. Bank-bank ini diperhitungkan memberikan pinjaman sebesar 20% dari total dan 8-10% dari total deposit. Bank jenis ini lebih fleksibel dalam mengambil keputusan dan berfungsi seperti bank komersial. Struktur kepemilikanlah yang menghalanginya untuk menjadi lebih efisien. (Imai, 1985)

Berikut merupakan bagan yang menunjukkan struktur perbankan China yang baru paska reformasi 1979.



**Gambar 3.3 Struktur Sistem Perbankan China Paska 1979**

Modernisasi sektor perbankan China dianggap masih akan memerlukan waktu yang lama. Para manajer bank lebih bertindak seperti birokrat demi mempertahankan kekuatan ekonomi mereka. Masih terdapat tekanan politik dan ekonomi untuk memberikan pinjaman beresiko. Selain itu, sistem manajemen dan staff masih memerlukan pelatihan dan pengalaman sebelum bank-bank tersebut dapat beroperasi sebagai bank komersial modern.

Ketika krisis financial melanda Asia pada tahun 1997, China tidak terkena imbas seperti Negara-negara asia lainnya. Pada umumnya modal asing yang ada di China adalah dalam bentuk investasi langsung sehingga tidak bisa ditarik secara cepat. Bila dibandingkan dengan di Thailand dan Indonesia, salah satu penyebab ditariknya dana secara massal oleh para investor asing juga adalah nilai mata uang yang overvalued. Hal yang sama tidak terjadi di China. Sistem perbankan China dianggap sebagai institusi pemerintah yang dapat melindungi deposit para nasabah. Karenanya, China dianggap tidak akan mengalami fenomena *bank-run*. (Imai, 1985)

Reformasi sektor perbankan hanya salah satu aspek dalam proses reformasi ekonomi China dan memiliki karakteristik yang sama dengan sector lainnya. Pertama, reformasi ini adalah proses yang gradual sehingga institusi dapat mengalami proses pembelajaran untuk melihat opsi yang terbaik bagi China. Sifat gradual ini juga memungkinkan dilakukannya percobaan untuk menguji efektivitas dari pilihan yang diambil. Selain itu akan tersedia waktu yang cukup untuk proses penyesuaian terhadap institusi yang baru. Karakteristik kedua, sejalan dengan fakta bahwa PBC adalah bagian dari perangkat *central planning* dan bahwa sebagian besar bank-bank komersial adalah milik negara, maka reformasi berjalan dengan lambat terkait dengan faktor birokrasi. Ketiga, reformasi di sistem perbankan China harus belajar dari beberapa keberhasilan reformasi perusahaan milik negara (*responsibility system*, penerapan *joint ventures*, mendorong kompetisi dari sektor swasta). (Imai, 1985)

Perjalanan reformasi sistem moneter China menunjukkan bagaimana pemerintah China berusaha memaksimalkan fungsi institusi ekonomi ini. Institusi moneter yaitu PBC dan segenap perangkatnya bukan hanya penting untuk menjalankan otonomi moneter di China tetapi juga untuk mendukung kedua

kondisi makroekonomi lainnya yaitu stabilitas nilai tukar dan mobilitas modal. Trade-off yang dipilih oleh pemerintah China, yaitu untuk mengorbankan mobilitas modal harus didukung oleh perbankan yang kuat dalam menjalankan fungsi redistribusi modal.

### **III.2. Faktor Politik**

Penolakan China terhadap reformasi sistem nilai tukarnya didasarkan pada alasan-alasan ekonomi dan lemahnya sistem keuangannya. Para pembuat kebijakan khawatir kalau pasar keuangan yang terbuka dan sistem nilai tukar yang mengambang dapat menghasilkan keluarnya modal dalam jumlah yang besar dan juga depresiasi dari mata uang. Terlebih lagi, pembukaan pasar keuangan terlalu cepat dapat mengakibatkan *over-competition* dan instabilitas pasar keuangan. Namun, keenganan pemerintah China untuk bahkan mengambil langkah *adjustment* pada level yang masih dapat ditoleransi, menimbulkan dorongan untuk tidak hanya melihat dari segi ekonomi saja. Dan disinilah rasional politik memainkan peran.

Pemerintah China jelas memiliki preferensi tersendiri dalam mempertahankan sistem nilai tukar tetap. Partai Komunis China (PKC) mendapat keuntungan politik dengan mempertahankan nilai tukar *undervalued*: dengan memberikan subsidi perusahaan yang *foreign-invested* di daerah pinggir pantai maka akan meningkatkan daya saing sektor manufaktur ekspor. Pemerintah memperluas sektor manufaktur pinggir pantai untuk menyerap tenaga kerja dari sektor milik negara yang tidak efisien. Kebijakan ini telah membantu pemerintah untuk mempertahankan stabilitas sosial dan akhirnya mendukung otoritas PKC.

Sektor manufaktur ekspor memiliki nilai penting bagi China dimana dari tahun 1993-2002 telah mengalami pertumbuhan rata-rata 11,4% per tahun. Kesuksesan sektor ini telah membantu penyediaan lapangan pekerjaan dan stabilitas sosial. Apalagi ketika sektor-sektor lain yang mengalami penumpukan hutang, kehilangan pekerjaan dan lainnya. Karenanya, pemerintah tidak melihat pilihan revaluasi mata uang menguntungkan bagi China. Selain akhirnya akan menghambat pertumbuhan sektor ekspor, hal ini dapat memicu ketidakstabilan sosial.

Pentingnya kestabilan politik dan ekonomi ini sangat disadari oleh para pemimpin China. Teng Hsiao-p'ing berulang kali menekankan pesan ini kepada rakyat China. Melalui pidato-pidatonya, dapat ditarik beberapa point penting, yaitu: (Hsu, 2000)

4. perkembangan ekonomi adalah tugas utama pemerintah. Reformasi dan keterbukaan merupakan dua pilarnya.
5. stabilitas adalah sangat penting dalam perkembangan ekonomi
6. superioritas sosialisme dapat ditunjukkan melalui peningkatan ekonomi nasional
7. pengalaman dengan pasar saham dan modal asing, teknologi tingkat tinggi dari asing, joint ventures mulai diterima

Dibawah sistem ekonomi yang terpusat, tugas utama pemerintah adalah menyediakan pekerjaan bagi setiap penduduk. Lebih dari itu, pemerintah juga harus menyediakan perumahan, pelayanan kesehatan, pensiun usia tua, pendidikan untuk anak-anak. Dengan reformasi ekonomi, pemerintah melepaskan kontrolnya terhadap sistem penerimaan pekerjaan. Kontrol pemerintah terhadap alokasi pekerjaan menurun secara tajam dari 76% menjadi 52% dari seluruh total pasar pekerja antara 1980-1992. Penempatan pekerjaan terbatas pada sarjana di perusahaan milik negara dan perusahaan milik kolektif yang besar. (Hsu, 2000)

Seiring dengan semakin bebasnya pasar tenaga kerja, pemerintah semakin meninggalkan tanggungjawabnya untuk menjamin pemenuhan lapangan pekerjaan. Tingkat pengangguran mengalami peningkatan secara signifikan pada akhir tahun 1990an, seiring dengan reformasi pada SOEs. Yang paling terkena dampak adalah pekerja yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki keahlian. Pengangguran pun menjadi masalah utama pemerintah (Hsu, 2000). *The State Council's China Development and Reform Commission* menyebutkan bahwa terdapat 25 juta orang yang akan memperebutkan 11 juta lapangan pekerjaan di daerah urban. Pengangguran ini menjadi masalah yang lebih parah di daerah yang menjadi pusat penempatan SOEs. Pada tahun-tahun ke depannya, masalah pengangguran akan menjadi fokus dari pemerintah karena agenda reformasi dan modernisasi sistem ekonomi. (Giles, Park, dan Zhang, 2004)

Dewasa ini, lapangan pekerjaan di China terpusat pada sektor industri. Peningkatan lapangan pekerjaan di sektor industri dapat ditunjukkan melalui bagan di bawah ini :

**Tabel 3.8 Grafik Lap. Pekerjaan per Sektor di China 1970-2000**

Tahun	Pertanian	Industri	Jasa	Total
	(juta orang)			
1970	278.1	35.2	31.0	344.3
1980	291.2	77.1	55.3	423.6
1985	311.3	103.8	83.6	498.7
1989	332.3	119.8	101.3	553.4
1990	384.2	136.5	118.3	639.0
1995	354.7	156.3	168.5	679.5
2000	355.8	160.1	195.7	711.6
Tingkat Pertumbuhan Tahunan (persen per tahun)				
1970–80	0.5	8.2	6.0	2.1
1980–89	1.5	5.0	7.0	3.0
1990–2000	-0.8	1.6	5.2	1.1
1990–95	-1.6	2.7	7.3	1.2
1995–2000	0.1	0.5	3.0	0.9

(Sumber: China's future in the knowledge economy: Engaging the new world, 2002, telah diolah kembali)

Selain politik domestik, sistem nilai tukar ini juga memiliki nilai politik internasional (termasuk regional). Seperti yang telah diutarakan di bab dua bahwa tekanan AS dalam isu reformasi ini sangat bersifat politis. Karenanya, pemerintah China juga menunjukkan pendiriannya mengenai otonomi negara dalam melakukan satu kebijakan. Secara tegas diutarakan oleh pemerintah China bahwa mereka tidak ingin melakukan satu langkah karena ditekan oleh pihak luar.<sup>2</sup> Secara regional, sejak krisis finansial yang melanda Asia pada tahun 1997-1998, China telah memainkan *leading role* dalam menjaga kestabilan dan keterbukaan di Asia (Yang, 2002). Semakin tahun, hubungan dagang antara China dan negara-negara asia, khususnya asia tenggara terus mengalami peningkatan. Karenanya, kestabilan harga mata uang China juga merupakan faktor penting bagi negara-negara Asia lainnya, terutama yang memiliki hubungan dagang yang besar dengan China. Kurangnya dukungan dari negara-negara Asia terhadap tekanan AS dalam

<sup>2</sup> Lihat pernyataan-pernyataan pemerintah China di Bab II

isu reformasi sistem nilai tukar China ini membuat China juga lebih mengutamakan kestabilan mata uangnya.

Ketika reformasi sistem nilai tukar dilakukan dengan drastis, maka akan berpengaruh pada permintaan ekspor, dimana turunannya akan terlihat pada industri di China. Melemahnya industri akan mengakibatkan efisiensi. Efisiensi pekerja biasanya menjadi salah satu pilihan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal inilah yang dihindari oleh pemerintah. Spekulasi di kalangan industri dapat mendorong mereka untuk melakukan efisiensi tersebut. Karenanya, untuk menjamin kestabilan sosial, pemerintah China harus benar-benar memperhitungkan dampak dari langkah-langkah reformasi sistem nilai tukar ini.

